

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENANGANAN KAWASAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan penanganan kawasan kumuh terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
14. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
16. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan Rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
17. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disingkat Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara Setiap Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang

dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.

18. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disingkat PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.
19. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan pelaku pembangunan untuk memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarkan informasi mengenai Rumah atau Perumahan dan satuan Rumah susun atau Rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
23. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
24. Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan tata ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional.
28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
30. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
31. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
32. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
33. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
34. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman,

- Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.
38. Pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
 39. Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
 40. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
 41. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
 43. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
 44. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
 45. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman.
 46. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
 47. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam melakukan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh baru dan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. penyelenggaraan Perumahan;
- c. penyelenggaraan Kawasan permukiman;
- d. pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama dan peranserta masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan Daerah, dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun pada tingkat Daerah dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tanah;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan

- e. pendanaan dan pembiayaan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rumah;
 - b. perumahan;
 - c. permukiman;
 - d. lingkungan hunian; dan
 - e. kawasan permukiman.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional dan provinsi;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah;
 - h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;

- m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
 - o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
 - p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah bersama DPRD;
 - c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat Daerah;
 - g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah antara Pemerintah Daerah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah;
 - i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah;
 - j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - k. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - m. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - n. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - o. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
 - p. pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
 - q. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
 - r. sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tingkat kemampuan kecil.

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
 - a. perencanaan Perumahan;
 - b. pembangunan Perumahan;
 - c. pemanfaatan Perumahan; dan
 - d. pengendalian Perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum, Rumah swadaya, dan Rumah khusus.-
- (5) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Perumahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada dokumen RKP.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

- (4) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan mencakup:
 - a. kebijakan pembangunan dan pengembangan;
 - b. rencana kebutuhan penyediaan Rumah;
 - c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. program pembangunan dan pemanfaatan.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dilakukan dalam bentuk rencana:
 - a. pembangunan dan pengembangan;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.

Pasal 11

Penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
 - b. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perkotaan.
- (3) Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana, Rumah menengah, dan/atau Rumah mewah.

Paragraf 2

Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menciptakan Rumah yang layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh masyarakat dan Pemerintah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

- (2) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk menciptakan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.
- (3) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat.
- (4) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang fungsional, dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan dan perancangan Rumah.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar Rumah meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. aspek keselamatan bangunan;
 - b. kebutuhan minimum ruang; dan
 - c. aspek kesehatan bangunan.

- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi Rumah;
 - b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
 - c. perancangan Rumah.
- (5) Perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan Rumah.
- (6) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.
- (2) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;

- c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum .
- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
- (8) Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (9) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Perumahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pembangunan Perumahan meliputi:
- a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas Perumahan.
- (2) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- (3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.
- (4) Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan.
- (5) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah dan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum.
- (3) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (4) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. pembekuan PBG;
 - d. pencabutan PBG;
 - e. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain.
- (3) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak.

Pasal 23

- (1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. Perumahan skala besar; dan
 - b. Perumahan selain skala besar.
- (2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

Pasal 24

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. lokasi;
- b. klasifikasi Rumah; dan
- c. komposisi.

Pasal 25

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tempat Rumah umum dibangun.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. pembangunan Perumahan skala besar dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan; atau
 - b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan.

- (3) Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hampanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah.
- (4) Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hampanan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hampanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bersamaan.
- (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) hampanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pembekuan PBG;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. Rumah mewah;
 - b. Rumah menengah; dan/atau
 - c. Rumah sederhana.
- (2) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan perbandingan jumlah Rumah mewah, Rumah menengah, dan Rumah sederhana.
- (2) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
 - b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:

1. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
 2. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau
 3. 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.
- (3) Paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah sederhana subsidi dan Rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan untuk:
- a. kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi;
 - b. kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana nonsubsidi; atau
 - c. kawasan perkotaan kecil, 3 (tiga) Rumah sederhana subsidi berbanding 1 (satu) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonversi dalam:
 - a. bentuk Rumah Susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama; atau
 - b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum.
- (2) Penghitungan konversi Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perbandingan komposisi persentase Rumah sederhana subsidi dengan Rumah sederhana nonsubsidi;
 - b. jumlah kewajiban Rumah sederhana;
 - c. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
 - d. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual.
- (3) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kelola atau hibah dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah kewajiban Rumah sederhana;

- b. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - c. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual;
 - d. faktor pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu (*time value of money*); dan
 - e. dana imbal jasa pengelolaan.
- (4) Penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (5) Besaran jumlah faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (6) Harga jual Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib diajukan oleh pelaku pembangunan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (2) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (3) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum diterbitkannya PBG.
- (4) Kewajiban penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya SLF.
- (5) Pengembalian Dana Konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak pemenuhan kewajiban diberikan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (6) Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan penyerahan dana hasil konversi sebagaimana pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pembekuan PBG; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan dana konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Pembangunan Rumah

Pasal 31

- (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun.
- (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan Pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui Sistem PPJB.
- (4) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.
- (5) PPJB dilakukan setelah kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (8) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.

- (9) Setiap orang yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (10) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sistem PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:

- a. Pemasaran; dan
- b. PPJB.

Pasal 33

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat:

- a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau
 - b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada.

Pasal 34

- (1) Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memiliki paling sedikit:
 - a. kepastian peruntukan ruang;
 - b. kepastian hak atas tanah;
 - c. kepastian status penguasaan Rumah;
 - d. perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun; dan
 - e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin.
- (2) Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat persetujuan KKPR yang telah disetujui Pemerintah Daerah.
- (3) Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status penguasaan tanah.
- (5) Kepastian status penguasaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas:
 - a. status sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
 - b. sertifikat hak milik satuan Rumah susun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan Rumah susun untuk Rumah susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah Daerah.
- (6) Perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat PBG.
- (7) Jaminan atas pembangunan perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dukungan bank atau bukan bank.

- (8) Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 35

- (1) Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat dengan memuat paling sedikit:
- a. nomor surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. nomor sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan;
 - c. surat dukungan dari bank/bukan bank;
 - d. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan;
 - e. nomor dan tanggal penerbitan PBG;
 - f. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun;
 - g. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun;
 - h. harga jual Rumah atau satuan Rumah susun;
 - i. informasi yang jelas mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan
 - j. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun.
- (2) Dalam hal sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan.
- (3) Penyampaian informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan/atau iklan di media massa.
- (5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 36

- (1) Pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB pada saat Pemasaran.
- (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan dapat menjelaskan kepada calon pembeli.

Pasal 37

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah.
- (2) Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi mengenai:
 - a. jadwal pelaksanaan pembangunan;
 - b. jadwal penandatanganan PPJB; dan
 - c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah.

Pasal 38

- (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan agen Pemasaran atau penjualan untuk melakukan Pemasaran.
- (2) Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen Pemasaran atau penjualan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.
- (2) Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.
- (3) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
- (4) Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis.
- (6) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.
- (7) Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terlaksana, pelaku

pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan.

Pasal 40

- (1) PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (2) Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.
- (3) Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. kondisi Rumah;
 - b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i;
 - c. penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; dan
 - d. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.
- (5) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Perumahan dibuktikan dengan:
 - a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase;
 - b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan
 - c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya Prasarana air minum dan Utilitas Umum berupa sumber listrik.
- (6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan:
 - a. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam suatu Perumahan yang direncanakan; atau
 - b. untuk Rumah susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah susun yang sedang dipasarkan.

- (8) Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi.

Pasal 41

PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. uraian objek PPJB;
- c. harga Rumah dan tata cara pembayaran;
- d. jaminan pelaku pembangunan;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. waktu serah terima bangunan;
- g. pemeliharaan bangunan;
- h. penggunaan bangunan;
- i. pengalihan hak;
- j. pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
- k. penyelesaian sengketa.

Pasal 42

- (1) Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatanganinya PPJB.
- (2) Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.
- (4) Dalam hal calon pembeli merupakan MBR, honorarium atas jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1‰ (satu per mil) dari harga jual Rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 43

- (1) Pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.
- (2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan seluruhnya kepada pembeli ditambah denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya sejak pembayaran dilakukan.
- (3) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan/sebagian pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan.
- (4) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.
- (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli

sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Rumah umum atau satuan Rumah susun umum yang mendapatkan subsidi pembangunan Perumahan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan proses PPJB oleh pelaku pembangunan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pembangunan Rumah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan:
 - a. Rumah umum; dan
 - b. Rumah khusus.
- (2) Pembangunan Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
 - b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Paragraf 4

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 47

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (7) Setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. perintah pembongkaran.
- (8) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas Perumahan

Pasal 48

- (1) Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- (2) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penurunan kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Perumahan

Pasal 49

Pemanfaatan Perumahan meliputi:

- a. pemanfaatan Rumah;
- b. pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan; dan
- c. pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan PBG;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan PBG.
- (5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan jenis dan bentuknya.
- (2) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, meliputi:
 - a. rumah komersial;
 - b. rumah umum;
 - c. rumah khusus; dan
 - d. rumah swadaya; Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar bangunan, meliputi:
 - a. rumah tunggal;
 - b. rumah deret; dan
 - c. rumah susun.
- (3) Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk:
 - a. rumah kos;
 - b. rumah kondotel;
 - c. rumah toko;

- d. rumah yang seluruh dan/atau sebagiannya disewakan secara harian, bulanan dan tahunan; dan
 - e. rumah kantor.
- (4) Ketentuan teknis bangunan gedung untuk jenis, bentuk dan pemanfaatan rumah, rumah komersial, rumah kos, rumah toko dan rumah kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi standar bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang bangunan gedung dan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Pasal 52

- (1) Setiap rumah dalam perumahan harus memenuhi standar untuk laik fungsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (2) Selain sebagai tempat tinggal, rumah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha secara terbatas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai RDTR dan Peraturan Zonasi.

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan Rumah tunggal atau rumah deret dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. tidak membahayakan penghuni serta lingkungan;
 - b. tidak menciptakan kebisingan sehingga mengganggu fungsi hunian;
 - c. tidak mengubah fungsi rumah dan mengganggu lingkungan; dan
 - d. menjamin terpeliharanya perumahan termasuk tidak menjadikan jalan sebagai tempat parkir.
- (2) Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas berada pada lokasi perumahan sesuai peruntukannya selain peruntukan rumah toko dan rumah kantor.
- (3) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha untuk praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan usaha;
 - b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil (*non bankable*);
 - c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
 - d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian dan tatanan lingkungan; atau
 - e. usaha masyarakat secara komunal seperti koperasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kegiatan usaha di luar ketentuan ayat (3) harus didasarkan pada perizinan dan/atau persetujuan dari pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan

- a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni Rumah.
- (2) Penghunian Rumah dapat berupa:
 - a. hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cara sewa menyewa; atau
 - c. cara bukan sewa menyewa.
- (3) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik Rumah.
- (4) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.
- (5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa menyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi *force majeure*.
- (6) Rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan.

Pasal 56

- (1) Harga sewa bagi Rumah sewa yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menetapkan harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus tetap memperhatikan spesifikasi Rumah dan lokasi Rumah yang disewakan serta kelangsungan usaha atau kegiatan sewa menyewa Rumah.

Pasal 57

Tata cara mengenai penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau cara bukan sewa menyewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian Perumahan

Pasal 58

- (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membentuk atau menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengendalian Perumahan.
- (2) Pembentukan atau penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;
 - b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pasal 61

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;
 - b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk kesesuaian pembangunan dengan perizinan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian pembangunan Perumahan dengan RTRW Kabupaten, perencanaan Perumahan, PBG, dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas Perumahan.

Pasal 62

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;
 - b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan SLF.
- (3) Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Rumah dengan fungsinya.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan SLF.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian.

Bagian Keenam

Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR

Pasal 63

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan Rumah;
 - b. stimulan Rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 64

- (1) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidi perolehan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Kemudahan/bantuan insentif perpajakan dan asuransi dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/ atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah.
- (7) Bantuan pembangunan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan bantuan pembangunan Rumah bagi MBR.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. dana;
 - b. bahan bangunan Rumah; dan/atau
 - c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Bantuan pembangunan Rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoleh dari Badan Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tata cara dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Orang perseorangan yang memiliki Rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah kepada pihak lain dalam hal:

- a. pewarisan;
 - b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
 - c. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.
- (2) Pengalihan kepemilikan Rumah umum melalui pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengalihan kepemilikan dalam hal penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan berdasarkan bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:
 - a. pindah kota tempat tugas; atau
 - b. memiliki Rumah baru.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 69

- (1) Arahan pengembangan kawasan Permukiman meliputi:
 - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - b. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan;
 - c. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - d. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - e. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman.
- (2) Arahan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam mewujudkan:
 - a. hubungan antara pengembangan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman; dan
 - b. kemudahan penyediaan pembangunan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman.

Paragraf 1
Hubungan Antarkawasan Fungsional Sebagai Bagian Lingkungan Hidup di
Luar Kawasan Lindung

Pasal 70

- (1) Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi fungsi antarkawasan yang saling mendukung kegiatan budidaya.
- (2) Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan budidaya lainnya sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang agar tidak mengubah fungsi utama kawasan budidaya lainnya;
 - b. mengembangkan kawasan Permukiman sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain di sekitarnya; dan
 - c. mengoptimalkan hasil budidaya secara terpadu dan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan kawasan Permukiman sebagai Lingkungan Hunian sesuai Peraturan Zonasi dalam RTRW Kabupaten;
 - b. pemenuhan standar pelayanan minimal kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keterpaduan akses Prasarana antara kawasan Permukiman dengan kawasan budidaya lainnya; dan
 - d. penyediaan Sarana untuk Lingkungan Hunian dengan kapasitas pelayanan berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk.

Paragraf 2

Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan atau Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan

Pasal 71

- (1) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan yang telah ditetapkan.
- (2) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perkotaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya; dan

- b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan yang mendukung kegiatan utama bukan pertanian.
- (4) Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perkotaan yang:
- a. menjadi bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (5) Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dengan pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
 - b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan;
 - c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perkotaan;
 - d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
 - e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan.

Paragraf 3

Keserasian Tata Kehidupan Manusia dengan Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mewujudkan tata kehidupan manusia yang serasi dengan lingkungan hidup.
- (2) Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga berbagai kegiatan manusia dalam rangka mencapai keberlanjutan kehidupan manusia.

Paragraf 4

Keseimbangan Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Setiap Orang

Pasal 73

- (1) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara pemenuhan kepentingan publik dengan kepentingan setiap orang.
- (2) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan melalui:
 - a. pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian;
 - b. pemberian informasi rencana kawasan Permukiman secara terbuka kepada masyarakat;
 - c. pemberian hak ganti rugi bagi setiap orang yang terkena dampak Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
 - d. pemberian insentif kepada setiap orang yang dengan sukarela memberikan haknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Paragraf 5

Lembaga Yang Mengoordinasikan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 74

Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan kelompok kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum

Pasal 75

Penyelenggaraan kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pengembangan yang telah ada;

- b. pembangunan Baru; atau
 - c. pembangunan kembali.
- (3) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 77

Perencanaan kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 78

- (1) Perencanaan kawasan Permukiman harus mencakup:
- a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan setiap orang.
- (3) Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen RKP.

Pasal 79

- (1) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) untuk memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman;
 - b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;
 - c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman.
- (3) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan serta rencana induk masing-masing sektor.

- (4) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 80

Penyusunan penetapan, dan peninjauan kembali RKP dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pembangunan

Pasal 81

- (1) Pembangunan kawasan Permukiman dilakukan sesuai dengan indikasi program dalam dokumen RKP yang telah ditetapkan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan kawasan Permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.
- (3) Pembangunan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pembangunan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sinkronisasi program dan anggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Pasal 82

- (1) Pembangunan kawasan Permukiman dilaksanakan melalui Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan.
- (2) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.
- (3) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a. pengembangan Lingkungan Hunian;
 - b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau
 - c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.
- (4) Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;
 - b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;
 - c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;

- d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan;
 - e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. pengembangan Permukiman perkotaan atau perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (5) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:
- a. penyediaan lokasi Permukiman perkotaan atau perdesaan;
 - b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - d. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana; dan
 - e. Pembangunan Permukiman perkotaan atau perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
- a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;
 - b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan; dan/atau
 - c. peremajaan Lingkungan Hunian perkotaan.
- (7) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Permukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (8) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 83

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.

- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 84

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tata bangunan; dan
 - b. keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;

- c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. keselamatan bangunan gedung;
 - b. kesehatan bangunan gedung;
 - c. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 85

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 86

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki syarat kualitas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 87

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak tersedia;

- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 88

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
- a. kakus/ kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 89

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai, yaitu meliputi:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 90

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf g mencakup:
- a. ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 91

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di Daerah.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

Bagian Kedua

Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 93

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pembangunan; dan
- c. tahap pemanfaatan.

Pasal 94

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
- b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
- c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 97

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 98

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 99

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 100

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala kepada Bupati.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 101

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 102

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 103

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 104

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 105

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;

- f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - g. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana proteksi kebakaran skala lingkungan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan swasta

Pasal 106

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- d. dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- e. berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 107

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis perumahan dan permukiman.

Pasal 108

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Paragraf 1 Umum

Pasal 109

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi

Pasal 110

- (1) Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah administrasi Rukun Warga.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (4) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (5) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (6) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 111

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 112

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.

Pasal 113

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 114

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar untuk menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

- (3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain termasuk milik adat/ulayat, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang yang dibuktikan dengan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 115

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah;
 - b. sedang;
 - c. tinggi; dan
 - d. sangat padat.
- (5) Klasifikasi kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 116

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kategori rendah;
 - b. kategori sedang; dan
 - c. kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 117

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan tabel daftar lokasi.

- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 118

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta pengurangan tingkat kekumuhan sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 119

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survey;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pola Penanganan

Pasal 120

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka setiap orang atau badan dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan.
- (10) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (9) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 121

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali.

Pasal 122

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 123

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Pasal 124

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 125

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;

- b. sosialisasi dan musyawarah/rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 126

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 127

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 128

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 129

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Dukungan Kegiatan Non Fisik

Pasal 130

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 5
Pengelolaan

Pasal 131

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 6
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 132

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
 - (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.
 - (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
 - (10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 135

- (1) Penyediaan tanah untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

- c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tahapan penyediaan lahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 136

- (1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah yang berkelanjutan serta menjamin kemudahan pembiayaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan dan sistem pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan serta kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR; dan/atau
 - c. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan alternatif sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
- a. pembiayaan berbasis komunitas;
 - b. pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;
 - c. pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat; dan/atau
 - d. alternatif sistem pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didorong oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan komunitas di masyarakat berdasarkan kesamaan profesi, hobi, lokasi,

atau alasan lain yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didorong oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama aktif dengan badan usaha.
- (4) Pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didorong oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan profit Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan Nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IX KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 139

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan kerja sama Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau

- c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 140

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Pasal 141

Peran serta masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 142

Peran serta masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survey lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 143

Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 144

Peran serta masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 145

Dalam proses pemugaran atau peremajaan, dan/atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 146

Peran serta masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 147

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari Bupati kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 148

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Kewenangan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman teknis dan/atau pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan selain ketentuan yang tertuang pada tugas, pokok dan fungsi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENANGANAN KAWASAN KUMUH

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan kawasan kumuh yang bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran serta masyarakat tersebut Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Peraturan Daerah ini mempunyai maksud dan tujuannya untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola tata ruang, *aksesibel*, berimbang dan sehat.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memberikan bantuan dan kemudahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.

Selanjutnya tujuan pengaturan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, sehat, serasi dan berkelanjutan;
- b. menumbuhkembangkan peran pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penyediaan rumah yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Yang dimaksud dengan “tingkat kemampuan kecil” adalah orang atau Badan Hukum yang mempunyai modal usaha sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "aspek keselamatan bangunan" merupakan kemampuan struktur bangunan Rumah dihitung berdasarkan beban muatan, beban angin, dan beban gempa sesuai standar yang berlaku.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebutuhan minimum ruang" adalah jumlah kebutuhan minimum luas ruang dengan cakupan 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa untuk Rumah tapak dan dapat dipenuhi secara bertahap beserta ketinggian minimum langit-langit 2,7 m (dua koma tujuh meter).

Huruf c
Yang dimaksud dengan "aspek kesehatan bangunan" adalah merupakan ketentuan sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan bahan bangunan yang sesuai dengan ketentuan standar.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilihan lokasi Rumah" adalah mengenai lokasi yang berada di luar zona bencana dan sesuai dengan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan luas dan dimensi kaveling" adalah mengenai luas lahan/kaveling efektif 60 m² (enam puluh meter persegi) - 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan lebar muka kaveling minimal 5 m (lima meter).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perancangan Rumah" adalah mengenai perancangan yang sesuai dengan ketentuan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik, beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sarana umum" merupakan penyediaan Sarana paling sedikit meliputi Rumah ibadah, tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertelaan" merupakan gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah susun yang disahkan oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap satuan Rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “delineasi” adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rendah” yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sedang” yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tinggi” yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sangat padat” yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR.....

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* serta akibat yang ditimbulkan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi guna pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - b. bahwa perkembangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung terus meningkat jumlah kasus dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal sosial dan batas usia dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, partisipatif, berkesinambungan, dan komprehensif;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dihapus.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
8. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual yang merupakan awal terjadinya HIV.
10. Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan pasien yang terkena infeksi menular seksual.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
12. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya

tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit.
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
15. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
16. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test* konseling, *testing* HIV dan *post-test* konseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
17. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT atau PITC dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test counseling*, *testing* HIV dan *post-test counseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
18. Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
19. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan pasien ke masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar, atau agar tidak menjadi beban orang lain.
20. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
21. *Surveilans* HIV atau *sero-surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (*unlinked anonymous*).

22. *Surveilans* perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

2. BAB V dihapus.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, masyarakat maupun sektor usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS serta akibat yang ditimbulkan dan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi HIV dan AIDS.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, maka kepengurusan dan keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) saat ini di tingkat Pusat sudah tidak ada, sementara tanggung jawab, tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS melekat di Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR.....

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia;
 - b. bahwa Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang memiliki cukup banyak pesantren sehingga dalam rangka memperkuat eksistensi dan kontribusi pesantren dibutuhkan adanya landasan hukum yang kuat;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pesantren di daerah sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Kementerian adalah kantor kementerian yang membidangi urusan agama di daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendanaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan Pesantren, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8. Afirmasi adalah penegasan/peneguhan atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan.
9. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.

Pasal 2

Fasilitasi Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian Hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan untuk menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas Pesantren untuk pengembangan fungsi pendidikan dan pemberdayaan santri.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Afirmasi dan Fasilitasi;
- b. pendanaan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II AFIRMASI DAN FASILITASI Bagian Kesatu Afirmasi

Pasal 5

Afirmasi dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengakuan terhadap lulusan Pesantren;
- b. pemberian kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
- c. pemberian kesempatan kerja.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi kepada Pesantren dalam bentuk hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Fasilitasi Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pesantren.
- (2) Dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam hal diperlukan Bupati melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pesantren.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal
BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR....TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Secara filosofis, kehadiran Pesantren merupakan sebuah ikhtiar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia manusia. Tidaklah berlebihan jika kemudian Pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan berbagai kekhasannya tersendiri. Sejarah telah mencatat bahwa banyak kontribusi penting Pesantren dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil'alamin* di Indonesia. Indikator Islam *rahmatan lil'alamin* dapat dilihat dari terlahirnya insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Temanggung, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Temanggung yang dikenal religius. Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Temanggung (2021), terdapat 193 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Jumlah santri di wilayah Temanggung berdasarkan kategori bermukim yaitu 14.038 santri. Sedangkan kategori santri yang tidak bermukim sebanyak 6.384. Secara keseluruhan jumlah santri baik yang bermukim ataupun tidak bermukim sebanyak 20.422 santri.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Fasilitas Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan peran Pesantren dalam pembangunan di Temanggung lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitas terhadap Pesantren di

Temanggung. Dengan demikian, maka Pesantren memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan visi dan misi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah hibah berupa jasa yang dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, kesehatan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR.....

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi dalam rangka memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan estetis;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya

disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

6. Tiang adalah tonggak panjang yang dipancangkan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Serat Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Jaringan Serat Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel Serat Optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
9. Gorong-gorong (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
10. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. *Cellplan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam penataan dan fasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

BAB II INFRASTRUKTUR PASIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Gorong-gorong (*Duct*);
- d. lubang kabel (*Manhole*); dan/atau
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Pasal 5

Penyediaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta; dan/atau
- d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Menara Paragraf 1 Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disediakan oleh penyedia Menara.

- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cellplan

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara di Daerah harus mengacu kepada *Cellplan*.
- (2) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelenggaraan Menara dapat terlaksana dengan baik.
- (3) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
 - a. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - b. menghindari pembangunan Menara yang tidak terkendali;
 - c. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara;
 - d. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. memudahkan pengawasan;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. pemerataan wilayah layanan telekomunikasi; dan
 - h. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 8

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.

- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Gorong-gorong (*Duct*)

Pasal 9

- (1) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah.
- (2) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri;
 - b. ruang sambung jongkok; dan
 - c. kabinet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 10

- (1) Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan sebagai tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Infrastruktur Pasif Lainnya

Pasal 11

- (1) Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa Jaringan Serat Optik.

- (2) Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDIRIAN ATAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di BMD dikenakan sewa.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang yang akan melakukan perubahan konstruksi, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN BMD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;

- c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif; dan
 - d. menyerahkan jaminan bongkar sebesar 5% (lima persen) dari nilai rencana anggaran dan biaya pembangunan konstruksi Menara dan Tiang.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR....TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Telekomunikasi dan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berupaya mengatur pembangunan, penataan, dan pengawasan, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Oleh karenanya pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara komprehensif akan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Selain itu juga dapat memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR.....

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan tetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi potensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan kebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
6. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

7. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
8. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian Kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang Kebakaran, serta sistem pemadam Kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api portabel dan pemadam khusus.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
12. Pencegahan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan mencegah terjadinya Kebakaran, dengan cara mengenali dan mengeliminasi potensi terjadinya Kebakaran.
13. Penyelamatan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*respon time*) pada saat dan setelah kejadian Kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan yang terdampak Kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi
14. Penyelamatan Lainnya adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian Kebakaran. Jenis dari operasi darurat non Kebakaran antara lain penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain
15. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
16. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.

17. Lift adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik-turun secara vertikal.
18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
19. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
20. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya Kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
25. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
26. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.

27. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.
28. Alat Penyelamatan Jiwa adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
29. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
30. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. menjadi panduan dan payung hukum dalam pelaksanaan tugas Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
 - b. mewujudkan keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya Kebakaran;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisasi kerugian yang menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, perekonomian dan gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh Kebakaran; dan
 - d. melindungi jiwa serta harta benda terhadap bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Manajemen pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- c. Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. Pemeriksaan dan Pengujian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
- e. Penyelamatan Lainnya;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan;
- h. Pendanaan;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB II

OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Objek manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
- b. Bangunan Permukiman; dan
- c. Kendaraan Bermotor.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Proteksi Pasif; dan
 - b. Sistem Proteksi Aktif.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
 - c. Sarana Penyelamatan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. alat pemadam api portabel;
 - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
 - c. sistem Hidran;
 - d. sistem Pemercik; dan
 - e. sistem pengendali asap.
- (5) Seluruh Bangunan Gedung wajib dilengkapi Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi B3, wajib:
- a. menyediakan sarana prasarana proteksi Kebakaran;
 - b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - c. menginformasikan dan memasang daftar B3 yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya Kebakaran dengan alat pemadam api portabel, Hidran Kebakaran dan Pemercik.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan sarana proteksi Kebakaran sesuai dengan jenis bangunan.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detector* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan *detector* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bangunan Permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni Bangunan Permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api portabel.

- (3) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (4) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bangunan Permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak 25m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.
- (5) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Bangunan Permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20m (dua puluh meter) dari setiap tempat.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi) wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik Hidran halaman.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan bermotor yang khusus mengangkut B3 harus:
 - a. menyediakan alat pemadam api portabel dan alat pelindung diri bagi awak kendaraan bermotor sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat atau label barang berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang mobil barang yang disesuaikan dengan jenis peruntukannya; dan
 - c. menginformasikan secara resmi jalan yang akan dilalui kepada instansi yang membidangi Kebakaran minimal 1 x 24 jam sebelum melintas.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada

petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat
Relawan Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Camat, Lurah, dan/atau Kepala Desa membentuk Redkar di setiap lingkungannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran memfasilitasi Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menggunakan dan mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran wajib:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri dari:
 - a. akses jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (5) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. tangga Kebakaran;
 - b. jalur landai atau ramp;
 - c. koridor;

- d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. *sqf* pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem Pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
- a. akses menuju Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 17

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi Kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan Kebakaran.

- (2) Denah sistem manajemen bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 18

- (1) Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung merupakan salah satu bagian dari Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang dibentuk oleh pengelola gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 19

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 20

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi penggunaan proteksi Kebakaran dan simulasi.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran diikuti oleh Tim Penanggulangan Kebakaran dan seluruh penghuni bangunan.
- (3) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Proteksi Aktif

Pasal 21

- (1) Alat pemadam api portabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api portabel yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (3) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, Hidran, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus mudah diakses dan terlindungi dari kemungkinan terganggunya layanan akibat ledakan, Kebakaran, banjir, gempa, tikus, serangga, badai, beku, pencurian dan kondisi ekstrem lainnya.
- (4) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- (5) Rencana dan spesifikasi sistem Hidran harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilaksanakan konstruksi.

Pasal 24

- (1) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Keenam Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi;
 - c. rekomendasi perubahan fungsi bangunan; dan/atau
 - d. laporan hasil inspeksi proteksi Kebakaran.

BAB IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN Bagian Kesatu Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 27

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel*

distance) 7,5 km (tujuh koma lima kilometer) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 (lima belas) menit.

- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan standar prasarana dan sarana penanggulangan bahaya Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Waktu Tanggap

Pasal 28

- (1) Waktu tanggap (*response time*) terdiri atas:
 - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*response time*) petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan Kebakaran untuk wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:
 - a. tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk Bangunan Gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal; dan
 - b. tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau lahan.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya Kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam Kebakaran terdekat menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

Bagian Ketiga Tata Laksana Operasional

Pasal 29

- (1) Tata laksana operasional penanggulangan bahaya Kebakaran disusun dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemadaman Kebakaran.

- (2) Tata laksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 30

- (1) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran.
- (2) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (3) Pelaksanaan operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (4) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan prioritas penggunaan jalan raya;
 - b. melawan arus lalu lintas jalan raya;
 - c. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju ke lokasi Kebakaran; dan
 - d. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.

Pasal 31

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Temanggung dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran daerah lain atas permohonan daerah lokasi Kebakaran.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah atau pengelola kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan Kebakaran menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Investigasi Kebakaran

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan investigasi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) investigator Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan kepada sarana dan prasarana proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah membidangi urusan Kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (5) Apabila dalam inspeksi ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah yang menangani urusan kebakaran dapat memberikan rekomendasi kepada kepolisian atau pihak terkait untuk mengambil langkah hukum.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (2) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemilik atau penanggungjawab Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.

Pasal 36

Setiap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 38

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

- (2) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.
- (3) Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu, kinerja sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 39

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya Kebakaran lebih tinggi, melaporkan kepada Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

BAB VI PENYELAMATAN LAINNYA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi penyelamatan lain, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dalam proses penyelamatan lainnya, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung/ pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/ atau mengosongkan lokasi Bangunan Gedung/ pekarangan/ jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi; dan

- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan pembongkaran atau merusak lingkungan dan/atau Bangunan Gedung dalam rangka melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda.
 - (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca Kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dini dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (5) Masyarakat dalam melakukan penanganan mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran kepada penyelenggara Bangunan Gedung dan masyarakat luas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan dalam rangka Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang yang pada waktu terjadi Kebakaran atau akan terjadi Kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau Alat Pemadam Kebakaran atau dengan cara apa pun merintang atau menghalangi pekerjaan memadamkan Kebakaran, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR....TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA
PENYELAMATAN LAINNYA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di daerah.

Melihat Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya Kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya Kebakaran dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di Kabupaten Temanggung, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan sehingga berakibat timbulnya bahaya Kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung karena tanpa peran aktif petugas Pemadam Kebakaran sulit bagi petugas pemadam Kebakaran dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Investigasi Kebakaran serta Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tenang dalam beraktifitas. Adapun bagi petugas pemadam Kebakaran dapat lebih maksimal melayani masyarakat karena sudah memiliki payung hukum di tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas terkait sub urusan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan” yaitu terdiri dari rumah sakit, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri, Gudang, hotel, tempat peribadatan, tempat pendidikan dan bangunan lain yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata” adalah bangunan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah investigasi Kebakaran dengan analisis insiden terkait kejadian Kebakaran dengan mengumpulkan fakta dan bukti-bukti yang terjadi di tempat kejadian Kebakaran serta menyimpulkan apakah penyebab terjadinya Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah konsultan perseorangan yang profesional atau suatu tim dengan izin Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR.....



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja Pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas, prestasi kerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari dan jam kerja ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.15 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.15 - 11.15 WIB
- (2) Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB
- (3) Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 1





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.920.329.183.722,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.616.598.571.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.240.191.603.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp127.861.128.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp13.205.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.063.276.383.157,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.454.040.067.756,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar empat puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.500.114.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp525.293.160.259,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.500.114.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.458.834.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp525.293.160.259,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp90.935.228.751,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.070.846.266,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.364.077.007,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp21.430.036.121,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp46.846.367.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp159.513.246.114,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp95.418.242.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.980.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp208.824.468.594,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp77.792.710.846,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp52.705.086.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp71.227.071.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp77.792.710.846,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp109.247.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.593.118.522,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp567.883.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp947.118.693,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.551.741.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp24.518.857.297,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.093.120.316,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp12.845.219.942,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp78.752.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp13.170.440.876,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp52.705.086.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp48.497.836.248,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp71.227.071.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.714.112.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp22.012.959.000,00 (dua puluh dua miliar dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.911.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 2





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam yang berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, dengan adanya perubahan kebijakan pada indeks *basic* tambahan penghasilan pegawai, dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.

19. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
20. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II
TPP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bahwa pemberian TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (4) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TIM PELAKSANA TPP

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
 - h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP.
 - (4) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan.
 - (5) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas memastikan penganggaran terkait TPP.
 - (7) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (9) Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait Peraturan Bupati tentang TPP dan pelaksanaan ditingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEROLEHAN TPP
Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian TPP Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = (70\% \times \text{Besaran TPP}) \times \text{nilai aktivitas kerja pegawai.}$$

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
$$\text{TPP Disiplin Kerja} = (30\% \times \text{Besaran TPP}) - \sum\% \text{ faktor pengurang disiplin kerja.}$$

Bagian Keempat
TPP Akhir

Pasal 11

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
$$\text{TPP} = (\text{TPP Produktivitas Kerja} + \text{TPP Disiplin Kerja}) - \text{pajak}.$$

Pasal 12

- (1) Penilaian penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pelaksanaan tugas Pegawai ASN bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja elektronik berisi rincian aktivitas kerja pegawai sesuai tugas/jabatannya.
- (3) Nilai produktivitas pegawai didasarkan pada aktivitas kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2.000 menit tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja;
 - b. 2.001 menit s/d. 3.000 menit diberikan 60 % (enam puluh persen) dari TPP produktivitas kerja;
 - c. 3.001 menit s/d. 4.000 menit diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP produktivitas kerja; dan
 - d. lebih dari 4.000 menit diberikan 100% (seratus persen) dari TPP produktivitas kerja.
- (4) Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.

Pasal 13

Kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat merupakan gabungan dan diverifikasi oleh atasan yang baru, bagi Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau kenaikan Kelas Jabatan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.

Bagian Kelima Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 15

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 - f. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - g. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) TPP diberhentikan sementara kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- d. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian negara/Daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
 - e. Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu) bulan berikutnya;
 - f. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin; atau
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Pegawai ASN yang menjadi Kepala Desa;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana; atau
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organik.
- (4) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan TPP mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TPP kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. bebas tugas; dan/atau
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan terhitung setelah ditetapkan menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PPPK terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (3) Besaran TPP ASN bagi PPPK berdasarkan Golongan dan bagi PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi memperoleh TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 15 menit, dikurangi 0,25% (nol koma lima persen);
 - b. terlambat 15 menit 1 detik s.d 30 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi 1% (satu persen);
 - d. terlambat 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. terlambat di atas 120 menit, dianggap tidak masuk kerja dan dikurangi 3% (tiga persen).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- b. pulang sebelum waktunya 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - c. pulang sebelum waktunya 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. pulang sebelum waktunya 90 menit 1 detik s.d. 120 menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 menit, dianggap tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.
 - (7) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
 - (8) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak masuk kerja pada bulan tersebut.
 - (9) Dalam hal ASN menjalankan cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari TPP Produktivitas.
 - (10) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan TPP bagi ASN Tugas Belajar dan Menjalankan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar, maka TPP diberikan berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK.
- (2) Pegawai ASN selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan TPP.
- (3) TPP berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. IPK di atas 3,5 sebesar 100% (seratus persen);
 - b. IPK 3,0 sampai dengan 3,5 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. IPK 2,5 sampai dengan 2,99 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. IPK di bawah 2,5 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - e. Dalam hal semester I belum terbit IPK, TPP diberikan 100% (seratus persen).

- (4) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar melebihi jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana pada ayat (2) wajib mengisi kertas kerja elektronik.

Bagian Kedelapan
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt., dan Plh.

Pasal 20

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya.
- (4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (7) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (8) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (9) Dalam hal TPP bagi Plt. dan Plh. selama aplikasi belum dapat digunakan, maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Presensi Elektronik

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi.
- (2) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (3) Selama mesin presensi elektronik dan aplikasi presensi tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian untuk dimasukkan dalam aplikasi presensi.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan, dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu besaran TPP pada tahun sebelumnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun sebelumnya yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, dibebankan pada rekening belanja TPP berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 23

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja.

- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (4) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh admin Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola sistem aplikasi;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar Penerimaan TPP; dan
 3. Data dukung ketidak hadiran.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (2) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.

- (3) Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah setelah penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TPP yang bersangkutan diberikan dari Perangkat Daerah asal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan mesin presensi elektronik (*finger print*) dan/atau aplikasi presensi maka pengusulan TPP dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemberian TPP untuk bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan bulan Januari tahun 2023 berpedoman pada besaran TPP dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. Rumus perhitungan Besaran TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,82.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1 (satu) dengan nilai 919 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 846 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,580 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

II. Besaran TPP

| NO | KELAS JABATAN | STANDAR TPP PER BULAN (Rp.) | | | | | |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|
| | | TPP ASN | KHUSUS INSPEKTORAT | ASISTEN SEKDA | KEPALA BAPPEDA, BKPSDM, BPKPAD | BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDA | SPRI/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA |
| 1. | Kelas 15 | 24.000.000 | | | | | |
| 2. | Kelas 14 | 9.500.000 | 12.900.000 | 12.000.000 | 11.200.000 | | |
| 3. | Kelas 13 | 9.200.000 | 9.300.000 | | | | |
| 4. | Kelas 12 | 6.800.000 | 8.300.000 | | | 8.000.000 | |
| 5. | Kelas 11 | 5.400.000 | 6.600.000 | | | 6.200.000 | |
| 6. | Kelas 10 | 4.800.000 | 5.800.000 | | | 5.600.000 | |
| 7. | Kelas 9 | 4.100.000 | 5.100.000 | | | 4.900.000 | |
| 8. | Kelas 8 | 3.400.000 | 4.300.000 | | | 4.250.000 | |
| 9. | Kelas 7 | 2.900.000 | 3.700.000 | | | 3.600.000 | 3.500.000 |
| 10. | Kelas 6 | 2.550.000 | 3.300.000 | | | 3.250.000 | 3.200.000 |
| 11. | Kelas 5 | 2.350.000 | 2.900.000 | | | 2.950.000 | 2.900.000 |
| 12. | Kelas 4 | 2.250.000 | 2.500.000 | | | | 2.750.000 |
| 13. | Kelas 3 | 2.150.000 | 2.400.000 | | | | 2.650.000 |
| 14. | Kelas 2 | 2.000.000 | | | | | |
| 15. | Kelas 1 | 1.800.000 | | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU PNS NON SERTIFIKASI DAN
PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI

| NO | GOLONGAN/RUANG | STANDAR TPP PER BULAN (Rp.) |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | GURU PNS NON SERTIFIKASI | 1.050.000 |
| 2 | PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9 | 750.000 |
| 3 | PPPK GOLONGAN 8 | 650.000 |
| 4 | PPPK GOLONGAN 7 | 600.000 |
| 5 | PPPK GOLONGAN 6 | 550.000 |
| 6 | PPPK GOLONGAN 5 | 500.000 |
| | | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....
KEPALA

.....
.....
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menambah kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai, perlu dilakukan perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan, sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. Rumus perhitungan Besaran TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,82.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1 (satu) dengan nilai 919 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 846 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,580 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

II. Besaran TPP

| NO | KELAS JABATAN | STANDAR TPP PER BULAN (Rp.) | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | TPP ASN | KHUSUS INSPEKTORAT | ASISTEN SEKDA | BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDA | SPRI/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA |
| 1. | Kelas 15 | 19.300.000 | | | | |
| 2. | Kelas 14 | 9.500.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | | |
| 3. | Kelas 13 | 9.200.000 | 9.300.000 | | | |
| 4. | Kelas 12 | 6.800.000 | 8.300.000 | | 8.000.000 | |
| 5. | Kelas 11 | 5.400.000 | 6.600.000 | | 6.200.000 | |
| 6. | Kelas 10 | 4.800.000 | 5.800.000 | | 5.600.000 | |
| 7. | Kelas 9 | 4.100.000 | 5.100.000 | | 4.900.000 | |
| 8. | Kelas 8 | 3.400.000 | 4.300.000 | | 4.250.000 | |
| 9. | Kelas 7 | 2.900.000 | 3.700.000 | | 3.600.000 | 3.500.000 |
| 10. | Kelas 6 | 2.550.000 | 3.300.000 | | 3.250.000 | 3.200.000 |
| 11. | Kelas 5 | 2.350.000 | 2.900.000 | | 2.950.000 | 2.900.000 |
| 12. | Kelas 4 | 2.250.000 | 2.500.000 | | | 2.750.000 |
| 13. | Kelas 3 | 2.150.000 | 2.400.000 | | | 2.650.000 |
| 14. | Kelas 2 | 2.000.000 | | | | |
| 15. | Kelas 1 | 1.800.000 | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU PNS NON SERTIFIKASI DAN
 PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI

| NO | GOLONGAN/RUANG | STANDAR TPP PER BULAN (Rp.) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | GURU PNS NON SERTIFIKASI | 1.050.000 |
| 2 | PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2021 | |
| | a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9 | 1.000.000 |
| | b. PPPK GOLONGAN 8 | 975.000 |
| | c. PPPK GOLONGAN 7 | 950.000 |
| | d. PPPK GOLONGAN 6 | 925.000 |
| | e. PPPK GOLONGAN 5 | 900.000 |
| 3 | PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2022 | |
| | a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9 | 750.000 |
| | b. PPPK GOLONGAN 8 | 650.000 |
| | c. PPPK GOLONGAN 7 | 600.000 |
| | d. PPPK GOLONGAN 6 | 550.000 |
| | e. PPPK GOLONGAN 5 | 500.000 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah wajib menyusun Peta Jabatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan bagan Peta Jabatan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan bagan Peta Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan bagan Peta Jabatan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan bagan Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan bagan Peta Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

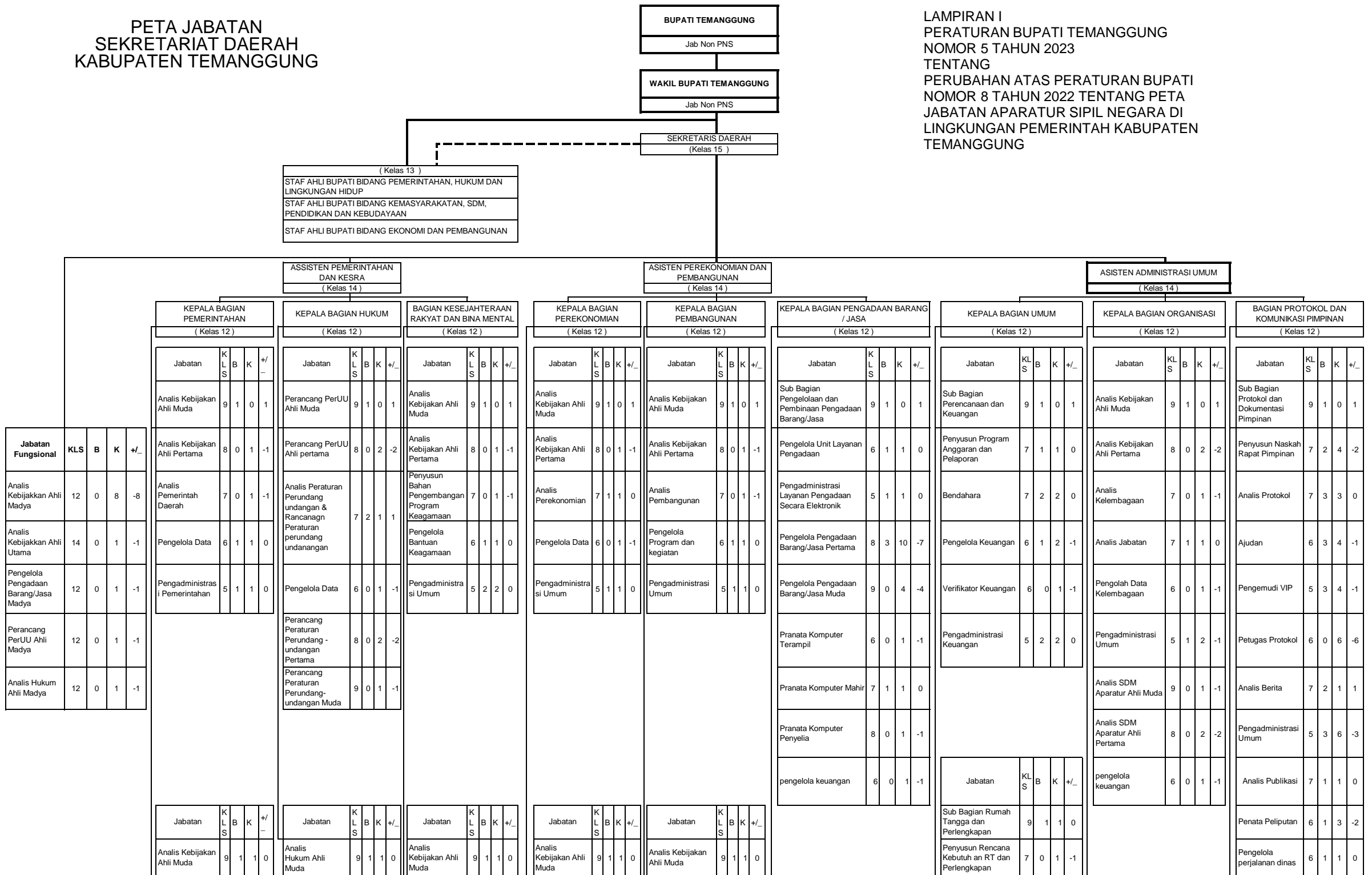
HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 5



**PETA JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**



| REKAPITULASI | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--|
| KIs | B | K | -/+ | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | 0 | 6 | -6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 19 | 20 | -1 | |
| 8 | 1 | 32 | -31 | |
| 7 | 21 | 36 | -15 | |
| 6 | 29 | 35 | -6 | |
| 5 | 33 | 50 | -17 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | |
| jml | 127 | 203 | -76 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pemerintahan Umum dan Otda | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Otonomi Daerah | 5 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| Analisis Hukum Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Peraturan Per UU & Rancangan Peraturan Per UU | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Penyusun Bahan Bantuan Hukum | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Hukum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|----|
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Kesejahteraan Rakyat | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Sarana Prasarana Ibadah | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Pengelola Bantuan Keagamaan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----|
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penelaah Perkembangan BUMD | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | KL | B | K | +/_ |
|--|----|---|----|-----|
| Sub Bagian LPSE dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | 8 | 0 | 10 | -10 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | 9 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |

| | | | | |
|---|----|---|---|-----|
| Pranata Jamuan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola kendaraan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi umum | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Teknisi peralatan kantor | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pengemudi | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Pramu bakti | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | KL | B | K | +/_ |
| kelas 9 | | | | |
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola perjalanan dinas | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sekretaris | 6 | 8 | 6 | 2 |
| Teknisi peralatan, listrik dan elektronika | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi persuratan | 5 | 3 | 4 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | KL | B | K | +/_ |
|---|----|---|---|-----|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Pelayanan Publik | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Tata laksana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | KL | B | K | +/_ |
|---------------------------------------|----|---|---|-----|
| Sub Bagian Komunikasi Pimpinan | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Data dan Informasi | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Data | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Pranata Humas Pelaksana | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Dokumentasi | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

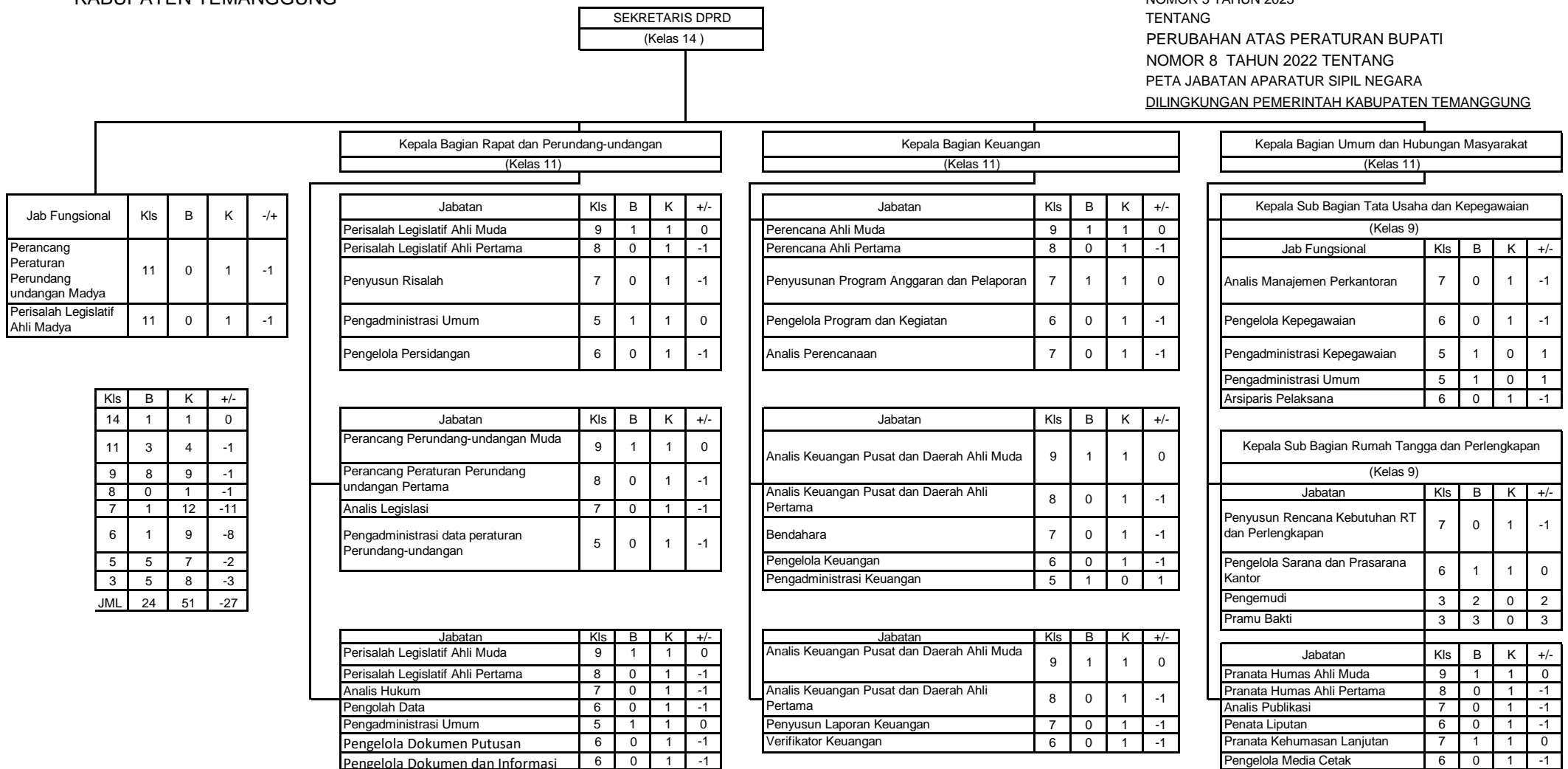
ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
ENDRO SUWARSO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196401021996031003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
(Kelas 14)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|----|----|-----|
| Pengawas Sekolah Utama | 13 | 1 | 6 | -5 |
| Pengawas Sekolah Madya | 11 | 36 | 75 | -39 |
| Pengawas Sekolah Muda | 9 | 0 | 20 | -20 |
| Pamong Belajar Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Pamong Belajar Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pamong Belajar Pertama | 8 | 3 | 30 | -27 |
| Penilik Sekolah Madya | 12 | 1 | 5 | -4 |
| Penilik Sekolah Muda | 10 | 11 | 15 | -4 |
| Penilik Sekolah Pertama | 8 | 0 | 4 | -4 |
| Analisis SDM Aparatur Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis SDM Aparatur Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis SDM Aparatur Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama | 8 | 3 | 3 | 0 |

Sekretaris
(Kelas 12)

Sub Koordinator Perencana
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--------------------------------|-----|---|---|-----|
| Perencana Ahli Muda | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Perencana Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 2 | 4 | -2 |
| Pranata Komputer Pelaksana | 6 | 1 | 4 | -3 |
| Pengelola Program dan Kegiatan | 6 | 0 | 2 | -2 |

Kepala Sub Bagian Keuangan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 2 | 3 | -1 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|-----------------------------------|-----|---|---|-----|
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Pengemudi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Pramu Bakti | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan PAUD
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal
(Kelas 11)

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
(Kelas 11)

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 | 2 | 2 | 0 |

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 | 2 | 2 | 0 |

Kasi Kurikulum Pendidik dan tenaga Kependidikan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 | 1 | 2 | -1 |

Kasi Pendidikan Masyarakat
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pengendalian Masyarakat | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | | 1 | -1 |

Kasi Kepemudaan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Analisis Kepemudaan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 2 | -1 |

Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Kependidikan | 5 | 2 | 2 | 0 |

Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Kependidikan | 5 | 2 | 2 | 0 |

Sub Koordinator Sarpras PAUD
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | 6 | 1 | 1 | 0 |

Kasi Pendidikan Kesetaraan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis kursus dan Kesetaraan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pendidikan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

Kasi Olah Raga
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|-----------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Keolahragaan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Olah Raga | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 2 | -2 |

| Sub koordinator Sarpras Sekolah Dasar (Kelas 9) | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 1 | 2 | -1 |

| Sub Koordinator Sarpras Sekolah Menengah Pertama (Kelas 9) | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah Pertama | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Sarpras | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Pengadministrasi Sarpras | 5 | 1 | 1 | 0 |
|--------------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|----|
| Asisten Pelatih Olah Raga Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Pelatih Olah Raga Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Pelatih Olah Raga Pemula | 5 | 0 | 1 | -1 |

| Sub Koordinator Sarpras Sarpras Olah Raga (Kelas 9) | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Sarana Olahraga | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pramu Kebersihan | 3 | 1 | 1 | 0 |

| Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Guru Madya | 11 | | | |
| Guru Muda | 9 | | | |
| Guru Pertama | 8 | | | |

| Sub Koordinator Wilayah | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Koordinator Wilayah | | | | |
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 7 | 20 | -13 |
| Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 | 5 | 20 | -15 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 4 | 20 | -16 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 17 | 20 | -3 |

| Kepala Sekolah Dasar | | | | |
|-----------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Guru Madya | 11 | | | |
| Guru Muda | 9 | | | |
| Guru Pertama | 8 | | | |
| Bendahara | 7 | | | |
| Pengadministrasi Umum | 5 | | | |

| Kepala Sekolah Menengah Pertama | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Guru Utama | 13 | | | |
| Guru Madya | 11 | | | |
| Guru Muda | 9 | | | |
| Guru Pertama | 8 | | | |
| Bendahara | 7 | | | |
| Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah | 6 | | | |
| Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 | | | |
| Verifikator Keuangan | 6 | | | |
| Pustakawan Pertama | 8 | | | |
| Pustakawan Muda | 9 | | | |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | | | |
| Arsiparis Pelaksana lanjutan | 7 | | | |
| Arsiparis Penyelia | 8 | | | |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama | 8 | | | |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Muda | 9 | | | |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Madya | 11 | | | |

| Kepala Sanggar Kegiatan Belajar | | | | |
|---------------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Bendahara | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pramu Kebersihan | 3 | 1 | 0 | 1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN
(Kelas 14)

SEKRETARIS
(Kelas 12)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Perencana Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | 0 | 0 | 0 |

Kepala Sub Bagian Keuangan
(Kelas 9)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi keuangan | 5 | 2 | 2 | 0 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|-----------------------------------|-----|---|---|-----|
| Pranata SDM Aparatur Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata SDM Aparatur Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata SDM Aparatur Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Penata laksana barang Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penata laksana barang Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penata laksana barang Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramu Bakti | 3 | 4 | 0 | 4 |

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
(Kelas 11)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Madya | 11 | 2 | 5 | -3 |
| Penyuluh Kesehatan madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Epidemiologi ahli madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Pembimbing Kesehatan kerja ahli madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian ahli madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisi ahli madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker madya | 11 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisi Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Nutrisi pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisi penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisi pelaksana lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisi pelaksana | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Gizi | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|----------------------------|-----|---|---|-----|
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Epidemiolog Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Pertama | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------|-----|---|---|-----|
| Epidemiolog Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Epidemiolog Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Pelaksana | 6 | 4 | 7 | -3 |
| Perawat Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Analisis Kesehatan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi umum | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengemudi ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|-------------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Adminkes Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Teknik elektromedik penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik elektromedik mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik elektromedik trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Adminkes Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|----|
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|----|
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Analisis Kesehatan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|----|
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Kesehatan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

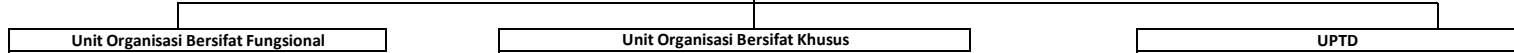
| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| Apoteker Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengawas farmasi dan makanan muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas farmasi dan makanan pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Asisten Apoteker Pelaksana | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Analisis obat dan makanan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Obat dan alat-alat kesehatan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi umum | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Epidemiolog Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Adminkes Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Adminkes Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola urusan kesehatan masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------|-----|---|---|-----|
| Adminkes Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|-------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis SDM Aparatur Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis SDM Aparatur Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Adminkes Muda | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Adminkes Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

UPTD LABKESDA

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 8 | 12 | -4 |

| Kepala UPT Laboratorium Kesehatan | |
|-----------------------------------|---|
| (Kelas 8) | |
| 1 | 1 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Sanitarian Pelaksana | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Sanitarian Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik elektromedik trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik elektromedik mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik elektromedik penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------|-----|---|---|-----|
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pramu bakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS

RAWAT INAP

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | 12 | 23 | -11 |
| 7 | 7 | 23 | -16 |
| 6 | 32 | 38 | -6 |
| 5 | 0 | 5 | -5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 57 | 103 | -46 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 13 | 13 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 8 | -4 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 6 | -4 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 16 | 18 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 8 | -6 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 5 | -3 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisi Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisi Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisi Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisi Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisi Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Juru Masak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Cuci | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS
(Kelas 9)

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 0 | 7 | -7 |
| 8 | 7 | 18 | -11 |
| 7 | 5 | 18 | -13 |
| 6 | 21 | 26 | -5 |
| 5 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 35 | 76 | -41 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 13 | 13 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 2 | 8 | -6 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 5 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 5 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | 13 | 19 | -6 |
| 7 | 4 | 14 | -10 |
| 6 | 16 | 19 | -3 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 36 | 66 | -30 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 4 | -1 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Bidan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 5 | 6 | -1 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Perawat Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | 0 | | 1 | | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| | Kls | B | K | -/+ | |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 1 | 7 | -6 |
| 8 | 9 | 20 | -11 |
| 7 | 10 | 17 | -7 |
| 6 | 19 | 24 | -5 |
| 5 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 44 | 76 | -32 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 13 | 13 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 8 | -3 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 6 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 5 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| (Kelas 8) | | | | |
| | 0 | 1 | | |
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL. KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 7 | -7 |
| 8 | 7 | 16 | -9 |
| 7 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | 17 | 22 | -5 |
| 5 | 0 | 5 | -5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 32 | 65 | -33 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 4 | 7 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 1 | 7 | -6 |
| 8 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 36 | 64 | -28 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Bidan Penyelia | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 2 | 4 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisiionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisiionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | 11 | 16 | -5 |
| 6 | 13 | 18 | -5 |
| 5 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 44 | 68 | -24 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 6 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----|---|----|-----|
| Jab Fungsional Umum | 1 | 1 | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| Pengadminstrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | 10 | 18 | -8 |
| 6 | 18 | 24 | -6 |
| 5 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 49 | 79 | -30 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 9 | 9 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 6 | -2 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 7 | 10 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 4 | 5 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Juru Masak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Cuci | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 7 | -6 |
| 8 | 11 | 18 | -7 |
| 7 | 6 | 15 | -9 |
| 6 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 42 | 69 | -27 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 14 | 12 | 2 |
| Bidan Mahir | 7 | 2 | 6 | -4 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 4 | -1 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | 14 | 22 | -8 |
| 7 | 9 | 17 | -8 |
| 6 | 19 | 26 | -7 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 48 | 83 | -35 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Trampil | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 12 | 15 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 4 | 8 | -4 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 6 | -4 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| RM Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |

Kasubag TU

(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | 1 | | 1 | | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|--|-----|
| | Kls | B | K | | |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 1 | | -1 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | | 0 |
| Juru Masak | 3 | 0 | 0 | | 0 |
| Juru Cuci | 3 | 1 | 0 | | 1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---|----|
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | 5 | 13 | -8 |
| 6 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 31 | 60 | -29 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 2 | 4 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| (Kelas 8) | | | | |
| | 1 | 1 | | |
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 1 | 0 | 1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | 11 | 16 | -5 |
| 7 | 7 | 14 | -7 |
| 6 | 13 | 20 | -7 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 38 | 68 | -30 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Trampil | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 5 | -2 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 2 | 5 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 3 | 9 | -6 |
| 8 | 16 | 23 | -7 |
| 7 | 15 | 19 | -4 |
| 6 | 21 | 27 | -6 |
| 5 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 62 | 88 | -26 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Trampil | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 5 | -1 |
| Bidan Penyelia | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 11 | 13 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Kasubag TU | | | | |
| (Kelas 8) | | | | |

| Jab Fungsional Umum | 0 | | 1 | | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| | Kls | B | K | -/+ | |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Juru Masak | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Juru Cuci | 3 | 0 | 0 | 0 | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 8 | -7 |
| 8 | 12 | 17 | -5 |
| 7 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 34 | 60 | -26 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 4 | 5 | -1 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|--|
| | | 1 | | 1 | |
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ | |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | |

BUPATI TEMANGGUNG,

tt.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 7 | -7 |
| 8 | 9 | 19 | -10 |
| 7 | 8 | 18 | -10 |
| 6 | 26 | 28 | -2 |
| 5 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 46 | 80 | -34 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 13 | 13 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 8 | -3 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 6 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------|-----|---|----|-----|
| Bendahara | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pengelola Program dan keg | 6 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4 | 10 | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS

RAWAT JALAN

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | 17 | 23 | -6 |
| 7 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | 11 | 15 | -4 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 37 | 64 | -27 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| RM Trampil | 6 | 2 | 2 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | 22 | 24 | -2 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 49 | 78 | -29 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 12 | 12 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 7 | -2 |
| Bidan Penyelia | 8 | 5 | 6 | -1 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Bidan Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 4 | 6 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Perawat Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 1 | 8 | -7 |
| 8 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | 6 | 15 | -9 |
| 6 | 14 | 19 | -5 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 35 | 70 | -35 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 5 | -2 |
| Bidan Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 5 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Perawat Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| | 1 | 1 | | |
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS

RAWAT JALAN

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | 16 | 21 | -5 |
| 7 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | 9 | 16 | -7 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 38 | 65 | -27 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 7 | 7 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 6 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | 1 | | 1 | | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| | Kls | B | K | -/+ | |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengadminstrasi Kepegaw | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS
(Kelas 9)

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | 4 | 18 | -14 |
| 7 | 13 | 21 | -8 |
| 6 | 20 | 30 | -10 |
| 5 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 44 | 88 | -44 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Trampil | 6 | 11 | 11 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 7 | -4 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 4 | -2 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 5 | 11 | -6 |
| Perawat Mahir | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 4 | -3 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

Kasubag TU
(Kelas 8)

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Masak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Cuci | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



72

| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 1 | 7 | -6 |
| 8 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | 7 | 15 | -8 |
| 6 | 16 | 22 | -6 |
| 5 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 43 | 72 | -29 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 9 | 9 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 4 | 5 | -1 |
| Bidan Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 6 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | 18 | 23 | -5 |
| 5 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 45 | 79 | -34 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 11 | 11 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 7 | 8 | -1 |
| Bidan Penyelia | 8 | 4 | 7 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 4 | 6 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | 1 | 1 | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Barang | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 1 | 8 | -7 |
| 8 | 15 | 22 | -7 |
| 7 | 6 | 17 | -11 |
| 6 | 19 | 25 | -6 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 45 | 81 | -36 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 12 | 12 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 8 | -5 |
| Bidan Penyelia | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 1 | 3 | -2 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---|----|
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 0 | 3 | -3 |
| 9 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | 12 | 21 | -9 |
| 7 | 12 | 19 | -7 |
| 6 | 21 | 26 | -5 |
| 5 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 50 | 86 | -36 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 3 | -2 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 2 | -2 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Trampil | 6 | 11 | 11 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 7 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 5 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Perawat Mahir | 7 | 4 | 6 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-----|
| Jab Fungsional Umum | 1 | 1 | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Masak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juru Cuci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | 5 | 17 | -12 |
| 6 | 22 | 25 | -3 |
| 5 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 43 | 76 | -33 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 15 | 15 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 3 | 9 | -6 |
| Bidan Penyelia | 8 | 2 | 5 | -3 |
| Bidan Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Penyelia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisionis Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Kasubag TU | | | | |
| (Kelas 8) | | | | |

| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
|--------------------------|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Kepegawa | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadminstrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 7 | |

| | | | | |
|------------------------------------|----|---|---|----|
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



| Kelas | B | K | -/+ |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | 1 | 8 | -7 |
| 8 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | 14 | 20 | -6 |
| 5 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 36 | 70 | -34 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Dokter Pertama | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Dokter Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Gigi Utama | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Apoteker Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Apoteker Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Apoteker Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bidan Trampil | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Bidan Mahir | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Bidan Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Bidan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Bidan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Bidan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Trampil | 6 | 3 | 6 | -3 |
| Perawat Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Perawat Penyelia | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Perawat Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Perawat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Gigi dan Mulut Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Terapis Gigi dan Mulut Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Sanitarian Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiologi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisiologi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisiologi Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Nutrisiologi Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiologi Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisiologi Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Trampil | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pranata Labkes Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Labkes Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Apoteker Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RM Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| RM Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| RM Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Trampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapi Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapi Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Administrator Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |

| Kasubag TU (Kelas 8) | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| 0 1 | | | | |
| Jab Fungsional Umum | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengad RM & Informasi | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Barang | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramubakti | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|----|---|---|----|
| Administrator Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Muda | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pembimbing Kesehatan Kerja Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

Sekretaris
(Kelas 12)

| Kls | B | K | +/- |
|-----|----|-----|-----|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 27 | -22 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | 32 | -15 |
| 8 | 6 | 75 | -69 |
| 7 | 7 | 90 | -83 |
| 6 | 9 | 70 | -61 |
| 5 | 60 | 125 | -65 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 5 |

Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Verifikator Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Perencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Perencana Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|-------------------------------------|-----|----|----|-----|
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana & Prasarana Kantor | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 11 | 12 | -1 |
| Pengemudi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pramu Bakti | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata SDM Aparatur Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata SDM Aparatur Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata SDM Aparatur Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Laksana Barang Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Laksana Barang Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Laksana Barang Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Kelompok Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Perencana Madya | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Ruang Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |

Kepala Bidang Bina Marga
(Kelas 11)

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Teknisi Jalan dan Jembatan Pelaksana | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |

Kepala Bidang Sumber Daya Air
(Kelas 11)

Teknik Pengairan Ahli Muda
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Teknisi Pengairan Pelaksana | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Pengairan Ahli Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |

Kepala Bidang Cipta Karya
(Kelas 11)

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |

Kepala Bidang Penataan Ruang
(Kelas 11)

Penata Ruang Ahli Muda
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penata Ruang Pelaksana | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |
| Penata Ruang Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Analisis Tata Ruang | 7 | 0 | 3 | -3 |

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Pengawas Jalan dan Jembatan | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Penilik Jalan | 7 | 0 | 4 | -4 |
| Pemeriksa Jalan dan Jembatan | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Pemeliharaan Jalan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola pembangunan & Peningkatan Jalan | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Operator Alat Berat | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Teknisi Peralatan Dan Mesin | 5 | 0 | 3 | -3 |

| |
|--|
| Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda |
| (Kelas 9) |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Jalan dan Jembatan | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Pengelola Pembangunan & Pemeliharaan Jembatan | 6 | 0 | 2 | -2 |

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| Teknik Pengairan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Pengairan Ahli Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Pengawas Irigasi | 7 | 2 | 6 | -4 |
| Pengelola Irigasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pemeriksa Irigasi | 7 | 1 | 6 | -5 |
| Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 6 | 0 | 1 | -1 |

| |
|-------------------------------------|
| Teknik Pengairan Ahli Muda |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda |
| (Kelas 9) |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Irigasi | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Teknisi Pengairan Pelaksana | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Pengairan Ahli Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Teknik Pengairan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Pengairan Ahli Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |
| Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Jasa Konstruksi | 6 | 1 | 1 | 0 |

| |
|---|
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda |
| Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda |
| (Kelas 9) |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Analisis Potensi Sumber Air Tanah | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Jaringan Utilitas | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Penyehatan Lingkungan | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |

| |
|------------------------|
| Penata Ruang Ahli Muda |
| (Kelas 9) |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Penentuan Pemanfaatan Ruang | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Tata Ruang | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Pelaksana | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 |
| Penata Ruang Ahli Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Penata Ruang Ahli Muda | 9 | 0 | 3 | -3 |

UPT



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

| Regional I | | | | | Regional II | | | | | Regional III | | | | | Regional IV | | | | | Regional V | | | | | Regional VI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--|-----|---|----|-----|--|-----|---|---|-----|--|-----|---|---|-----|--|-----|---|---|-----|--|-----|---|---|-----|--|---|---|----|----|------------------------------|---|---|---|----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- | | | | | | | | | | |
| Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 | Kepala UPTD | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 0 | 1 | -1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 0 | 1 | -1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 1 | 2 | -1 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pemelihara Jalan | 5 | 1 | 7 | -6 | Pemelihara Jalan | 5 | 1 | 10 | -9 | Pemelihara Jalan | 5 | 1 | 9 | -8 | Pemelihara Jalan | 5 | 4 | 8 | -4 | Pemelihara Jalan | 5 | 0 | 7 | -7 | Pemelihara Jalan | 5 | 0 | 7 | -7 | Pemelihara Jalan | 5 | 2 | 10 | -8 | | | | | |
| Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 8 | 8 | 0 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 3 | 7 | -4 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 3 | 7 | -4 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 3 | 7 | -4 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 2 | 7 | -5 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 2 | 7 | -5 | Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA | 5 | 3 | 7 | -4 | | | | | |
| Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 1 | 1 | Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 1 | 1 | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| Pramu bakti | 3 | 1 | 0 | 1 | Pramu bakti | 3 | 0 | 0 | 0 | Pramu bakti | 3 | 0 | 0 | 0 | Pramu bakti | 3 | 0 | 0 | 0 | Pramu bakti | 3 | 1 | 0 | 1 | Pramu bakti | 3 | 1 | 0 | 1 | Pramu bakti | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Teknisi Pengairan Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 | | | | | |
| Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 | | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|----|-----|
| Pengendali Dampak Lingkungan Madya | 11 | 0 | 14 | -14 |
| Pengawas Lingkungan Hidup Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya | 11 | 0 | 4 | -4 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Madya | 11 | 0 | 11 | -11 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Madya | 11 | 0 | 6 | -6 |
| Perencana Madya | 11 | 0 | 3 | -3 |

| Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kelas 11) | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Pemula | 4 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Terampil | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Mahir | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Penyelia | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Tata Bangunan & Perumahan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Perumahan dan Permukiman | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Pemula | 4 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Terampil | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Mahir | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Penyelia | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Penata Bangunan Gedung dan Permukiman | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Perumahan dan Permukiman | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Peta wilayah | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pertanahan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Survey Pengukuran & Pemetaan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Pertanahan | 5 | 2 | 2 | 0 |

| Kepala Bidang Tata Lingkungan (Kelas 11) | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Pengelola Lingkungan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Dokumen Perizinan | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|----|----|-----|
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Taman | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Lapangan Pelugas Pertamanan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Pengelola Sarana & Prasarana Taman | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Lingkungan | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pramu Taman | 5 | 0 | 6 | -6 |
| Pranata Taman | 3 | 15 | 20 | -5 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | 9 | 1 | 3 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Lingkungan | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Kelas 11) | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Lingkungan | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 3 | -2 |

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Lingkungan | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 8 | 1 | 3 | -2 |
| Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | 9 | 1 | 3 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Pemula | 4 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Terampil | 5 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Mahir | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Penyelia | 7 | 0 | 3 | -3 |

| Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (Kelas 11) | | | | |
|--|-----|----|-----|------|
| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Lapangan Pelugas Kebersihan Jalan, Saluran & Spolokan | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Penataan Sampah | 6 | 3 | 7 | -4 |
| Pengadministrasi Karcis | 5 | 1 | 3 | -2 |
| Teknis Mesin | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi | 3 | 15 | 30 | -15 |
| Pramu Kebersihan | 3 | 21 | 150 | -129 |

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|----|-----|-----|
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Lapangan Angkutan Sampah | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Penataan Sampah | 6 | 3 | 6 | -3 |
| Teknis Mesin | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pengemudi | 3 | 15 | 26 | -11 |
| Pramu Kebersihan | 3 | 19 | 100 | -81 |

UPTD



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

| Kepala UPT Rusunawa (Kelas 9) | | | | |
|---|-----|---|----|-----|
| Kepala Tata Usaha (Kelas 8) | | | | |
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 6 | -6 |
| Teknisi Sipil | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Teknisi Jaringan Instalasi | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Teknisi Gedung/Bangunan | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Pramu Bhakti | 5 | 0 | 6 | -6 |
| Petugas Kemanan | 3 | 6 | 12 | -6 |

| Kepala UPT Laboratorium Lingkungan (Kelas 9) | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Kimia | 7 | 0 | 8 | -8 |
| Pranata Laboratorium | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Pengelola Laboratorium | 6 | 0 | 4 | -4 |
| Teknisi Laboratorium | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Petugas Pengambil Contoh | 5 | 0 | 8 | -8 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Pramu Bhakti | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 1 | -1 |

| Kepala UPT TPA dan IPLT (Kelas 9) | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| Kepala Tata Usaha (Kelas 8) | | | | |
| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
| Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Lingkungan Hidup | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Penataan Sampah | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Operator Alat Berat | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Operator Mesin | 5 | 0 | 3 | -3 |
| Teknisi Mesin | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pramu Kebersihan | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 2 | -2 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Pemula | 4 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Terampil | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Mahir | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Penyelia | 7 | 0 | 1 | -1 |



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS EMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG

| Kelas | B | K | +/- |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | 0 | 10 | -10 |
| 7 | 2 | 12 | -10 |
| 6 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 28 | 2 | 26 |
| Jumlah | 52 | 57 | -5 |

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

Sekretaris
(Kelas 12)

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Perencana Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Perencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|-----------------------------------|-----|----|---|-----|
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Gudang | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Pengemudi | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 26 | 0 | 26 |
| Pramu Bakti | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Perlindungan Perempuan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Psikolog Klinis Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Psikolog Klinis Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Hukum Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Hukum Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data Pengendalian Masyarakat | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
(Kelas 11)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Keluarga Berencana | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi | 5 | 0 | 1 | -1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

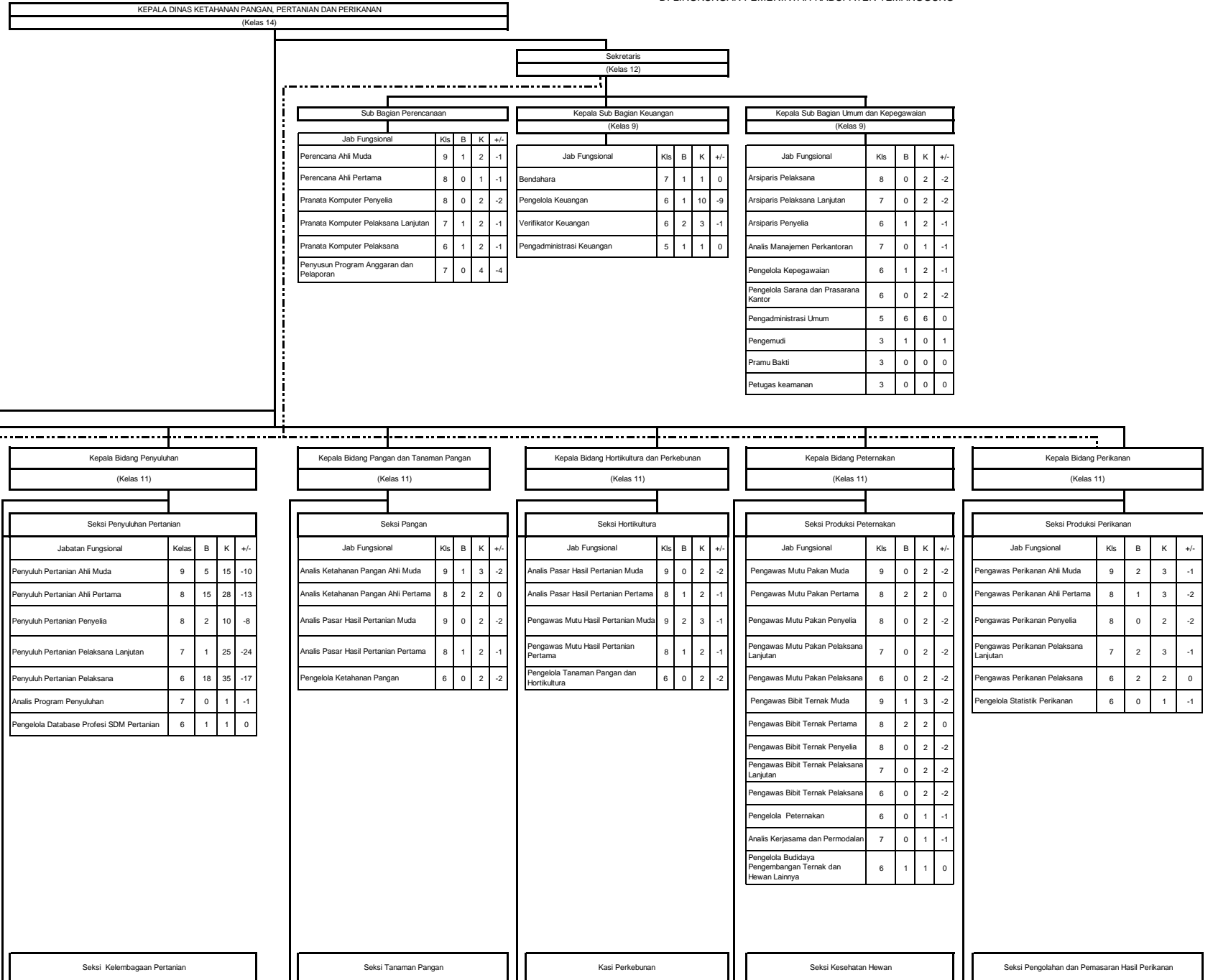
M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

| Kls | B | K | +/- |
|-----|-----|-----|------|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 23 | 62 | -39 |
| 9 | 31 | 88 | -57 |
| 8 | 57 | 147 | -90 |
| 7 | 9 | 88 | -79 |
| 6 | 50 | 138 | -88 |
| 5 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | 2 | 13 | -11 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jml | 186 | 551 | -365 |



| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuh | 9 | 2 | 5 | -3 |
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuh | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Lahan Pertanian | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas pupuk dan pestisida | 7 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan Fungsional | Kelas | B | K | +/- |
|--|-------|----|----|-----|
| Penyuluh Pertanian Ahli Muda | 9 | 6 | 15 | -9 |
| Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | 8 | 14 | 27 | -13 |
| Penyuluh Pertanian Penyelia | 8 | 2 | 10 | -8 |
| Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 7 | 2 | 25 | -23 |
| Penyuluh Pertanian Pelaksana | 6 | 17 | 35 | -18 |
| Analisis Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Database kelembagaan petani | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | 9 | 0 | 4 | -4 |
| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | 8 | 2 | 3 | -1 |
| Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Budidaya dan Pengembangan | 6 | 0 | 2 | -2 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 9 | 1 | 3 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman pelaksana | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman pelaksana | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola penilai usaha perkebunan | 6 | 0 | 2 | -2 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Medik Veteriner Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Medik Veteriner Ahli Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Paramedik Veteriner penyelia | 6 | 0 | 4 | -4 |
| Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan | 7 | 2 | 4 | -2 |
| Paramedik Veteriner Pelaksana | 8 | 0 | 4 | -4 |
| Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Keswan dan Kesmavet | 6 | 0 | 2 | -2 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda | 9 | 1 | 2 | -1 |
| Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Pengembangan Budidaya | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Pengawasan Pengolahan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Teknisi Pemeliharaan sarana dan prasarana | 5 | 2 | 3 | -1 |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana | 3 | 1 | 1 | 0 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
(Kelas 14)

Kepala UPTD Balai Benih
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih
(Kelas 8)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengawas Benih Tanaman Penyelia | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman Pelaksana lanjutan | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Teknologi Perbenihan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Pengembangan Bibit Tanaman | 4 | 0 | 1 | -1 |

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
(Kelas 8)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|----|-----|
| JFT Medik Veteriner ahli muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JFT Medik Veteriner ahli pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JFT Paramedik Veteriner Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| JFT Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| JFT Paramedik Veteriner Pelaksana | 6 | 2 | 3 | -1 |
| JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola UPTD Pasar Hewan dan RPH | 6 | 1 | 3 | -2 |
| Penagih Retribusi | 4 | 1 | 12 | -11 |

Kepala UPTD Puskeswan dan Balai Inseminasi Buatan
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Puskeswan dan Balai Inseminasi Buatan
(Kelas 8)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| JFT Medik Veteriner ahli muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| JFT Medik Veteriner ahli pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| JFT Paramedik Veteriner Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| JFT Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JFT Paramedik Veteriner Pelaksana | 6 | 1 | 2 | -1 |
| JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana | 5 | 1 | 2 | -1 |



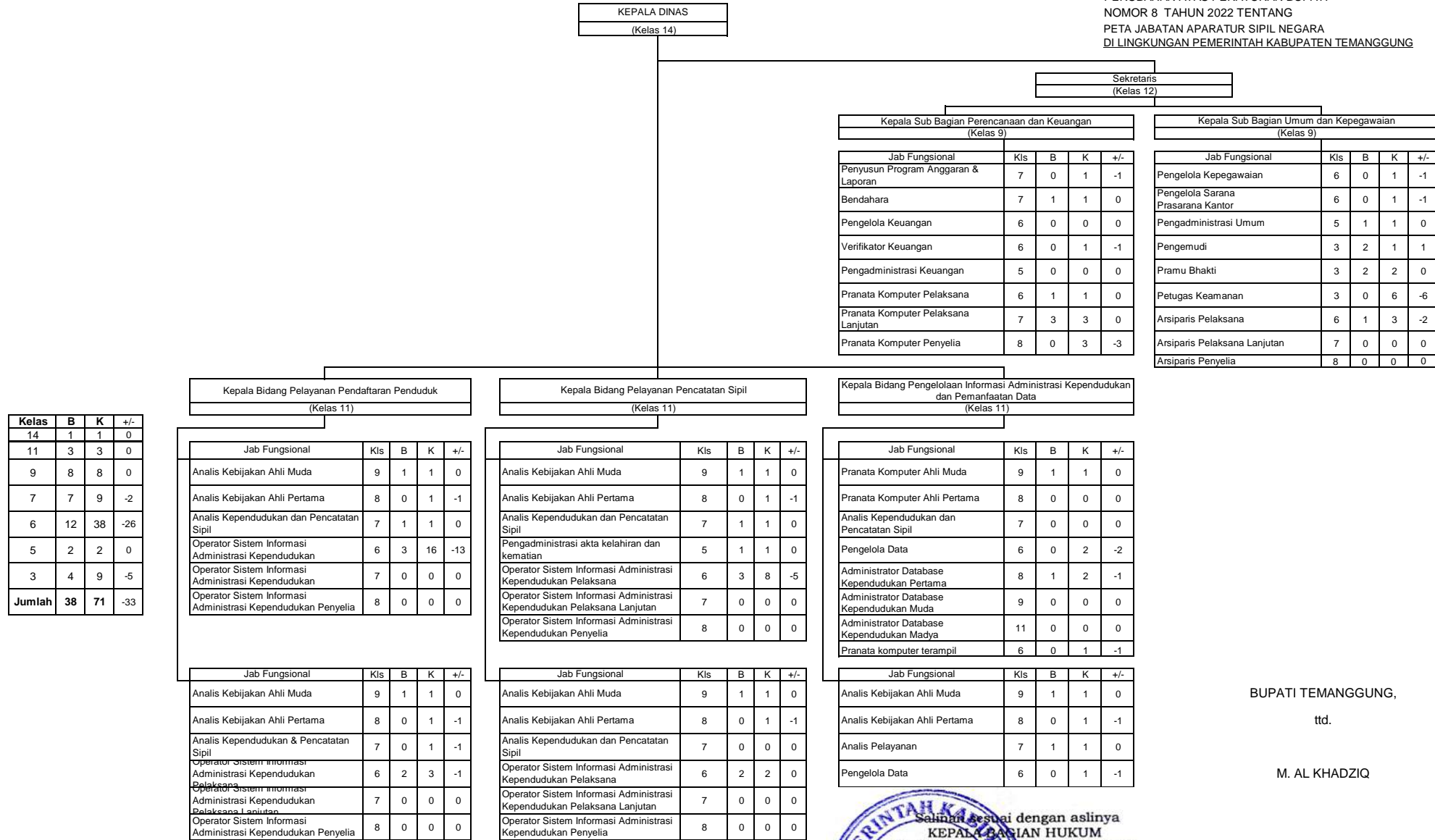
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



| Kelas | B | K | +/- |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | 12 | 38 | -26 |
| 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 9 | -5 |
| Jumlah | 38 | 71 | -33 |

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

| Kelas | B | K | +/- |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | 7 | 32 | -25 |
| 5 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | 3 | 8 | -5 |
| Jml | 41 | 79 | -38 |

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
(Kelas 11)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Penelaah Pengembangan Usaha | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha | 5 | 0 | 1 | -1 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Program dan Kerjasama | 5 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Desa
(Kelas 11)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Perencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pembangunan Desa | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Data dan Informasi | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Transfer | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Keuangan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengolah Data Laporan Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penvelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Desa | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi persuratan | 5 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pemerintahan Desa
(Kelas 11)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Desa dan Kelurahan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Administrasi Pemerintahan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Data | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Pemerintahan | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Desa dan Kelurahan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Pemerintahan | 5 | 1 | 1 | 0 |

Sekretaris
(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuanean
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Pengadministrasi Perencanaan & Program | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jab Fungsional | Kls | B | K | -/+ |
|-----------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Teknisi Peralatan dan Mesin | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Persuratan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Pramu Bhakti | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Petugas Kebersihan | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

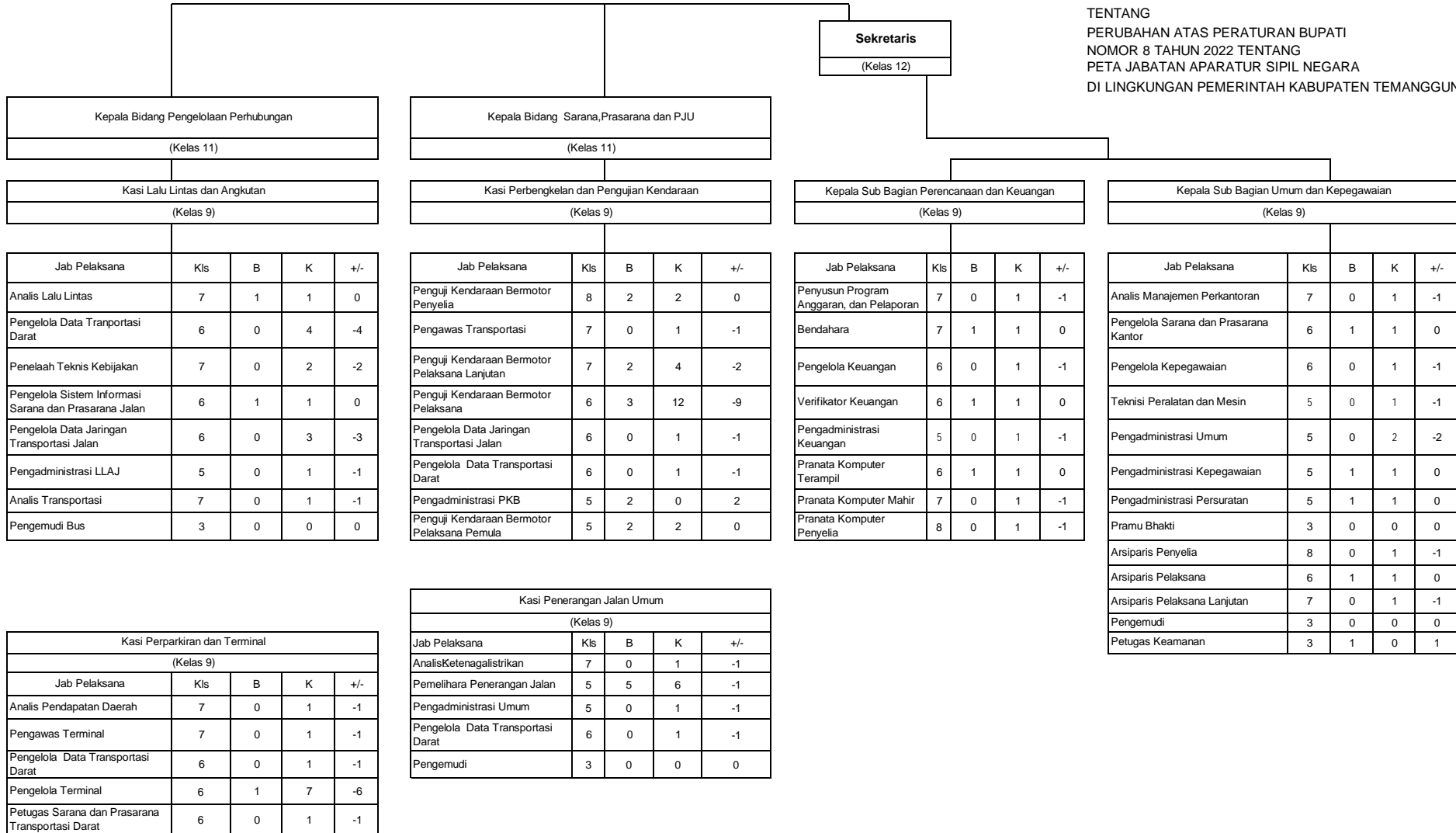


**PETA JABATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

| Kelas | B | K | +/- |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 4 | 17 | -13 |
| 6 | 11 | 39 | -28 |
| 5 | 13 | 21 | -8 |
| 4 | 0 | 21 | -21 |
| 3 | 12 | 0 | 12 |
| Jumlah | 52 | 112 | -60 |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
(Kelas 14)

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Sah sesuai dengan aslinya.
KEPADA AN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
SETDA
ENDANG SUWARSO, S.H
Pembina / Tingkat 1
NIP. 19610301003199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINKOMINFO
Kelas 14

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

| Jab Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
|-------------------------|-----|---|---|-----|
| Pranata Komputer Muda | 9 | 0 | 8 | -8 |
| Pranata Komputer Madya | 11 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Humas Muda | 9 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Humas Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Statistisi Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Sandiman Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |

SEKRETARIS
Kelas 12

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kelas 11

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kelas 11

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Bendahara | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Teknisi Peralatan dan Mesin | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Persuratan | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 5 | -5 |
| Pengemudi | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Pramu Bakti | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Petugas Keamanan | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Kelas 11

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kelas 11

Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Kelas 11

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Pranata Kehumasan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Kehumasan Ahli Pertama | 8 | 1 | 0 | -1 |
| Analisis Data dan Informasi | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Jurnalis | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Media Center dan Kemitraan Media | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Humas Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Humas Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Humas Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Humas Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Pranata Komputer Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 8 | 0 | 0 | -1 |
| Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 3 | -3 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 4 | -3 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Statistik | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Geospasial | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Sandiman Ahli Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Sandiman Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|---|-----|---|---|-----|
| Pranata Humas Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Humas Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Data dan Informasi | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengolah Konten Media Sosial | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Dokumentasi | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Humas Terampil | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Humas Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Humas Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Asisten Pranata Siaran Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Pranata Siaran Trampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Asisten Pranata Siaran Pemula | 5 | 0 | 1 | -1 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Pranata Komputer Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 1 | 4 | -3 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 4 | -3 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 4 | -4 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 |

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|-----------------------------------|-----|---|---|-----|
| Sandiman Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Sandiman Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Operator Sandi Dan Telekomunikasi | 6 | 1 | 3 | -2 |
| Sandiman Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Sandiman Muda | 9 | 0 | 2 | -2 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

| Kelas | B | K | +/- |
|------------|------------|-----------|------------|
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 12 | 14 | 2 |
| 8 | 6 | 15 | 9 |
| 7 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | 16 | 27 | 11 |
| 5 | 10 | 11 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 54 | 0 | -54 |
| JML | 107 | 89 | -18 |

Kepala Dinas
(Kelas 14)

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Sekretaris
(Kelas 12)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Pengawas Koperasi Ahli madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Analisis Perdagangan Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Pengawas Perdagangan Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| Penera Ahli Madya | 11 | 1 | 2 | -1 |
| Pengawas Kemtrolelogian | 11 | 0 | 2 | -2 |

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(Kelas 9)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|--|-----|---|---|-----|
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Bendahara | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 1 | 4 | -3 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

| Jabatan | Kls | B | K | +/- |
|-----------------------------------|-----|---|---|-----|
| Analisis Manajemen Perkantoran | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Pelaksana | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
(Kelas 11)

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Pengawas Koperasi Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pengawas Koperasi Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pemantauan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Perdagangan
(Kelas 11)

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Analisis Perdagangan Ahli Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Analisis Perdagangan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Penguji Mutu Barang Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penguji Mutu Barang Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penguji Mutu Barang Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pameran dan Peragaan | 6 | 0 | 1 | -1 |

Kepala Bidang Pengelolaan pasar
(Kelas 11)

| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- |
|---|-----|---|---|-----|
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Pengembangan Pasar | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Analisis Pendapatan Daerah | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Pasar | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Pendapatan | 6 | 0 | 1 | -1 |

UPT

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
 UPT DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

| Kepala UPT Metrologi (Kelas 8) | | | | | | Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan (Kelas 9) | | | | | | Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung (Kelas 9) | | | | | | Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Parakan (Kelas 9) | | | | | | Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo (Kelas 9) | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|--|---|-----|---|---|-----|--|--|-----|----|---|-----|--|--|-----|---|---|-----|--|--|-----|----|---|-----|--|
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan (Kelas 8) | | | | | | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung (Kelas 8) | | | | | | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Parakan (Kelas 8) | | | | | | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo (Kelas 8) | | | | | | | | | | | |
| Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- | | Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- | | Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- | | Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- | | Jabatan Fungsional | Kls | B | K | +/- | |
| Penera Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 | | Pengelola Keuangan | 6 | 1 | 0 | 1 | | Pengelola Keuangan | 6 | 1 | 0 | 1 | | Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 0 | 0 | | Pengelola Keuangan | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Penera Ahli Pertama | 8 | 2 | 2 | 0 | | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | | Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda | 9 | 0 | 2 | -2 | | Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 | | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | | Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 | | Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 | | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 | 0 | 1 | -1 | | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 | 0 | 1 | -1 | | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 | 0 | 1 | -1 | | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 | 0 | 1 | -1 | |
| Pengamat Tera Penyelia | 8 | 0 | 3 | -3 | | Juru Pungut Retribusi | 3 | 1 | 0 | 1 | | Juru Pungut Retribusi | 3 | 7 | 0 | 7 | | Juru Pungut Retribusi | 3 | 7 | 0 | 7 | | Juru Pungut Retribusi | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Pengamat Tera Mahir | 7 | 0 | 3 | -3 | | Pramu Kebersihan | 3 | 3 | 0 | 3 | | Pramu Kebersihan | 3 | 16 | 0 | 16 | | Pramu Kebersihan | 3 | 4 | 0 | 4 | | Pramu Kebersihan | 3 | 11 | 0 | 11 | |
| Pengamat Tera Terampil | 6 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,

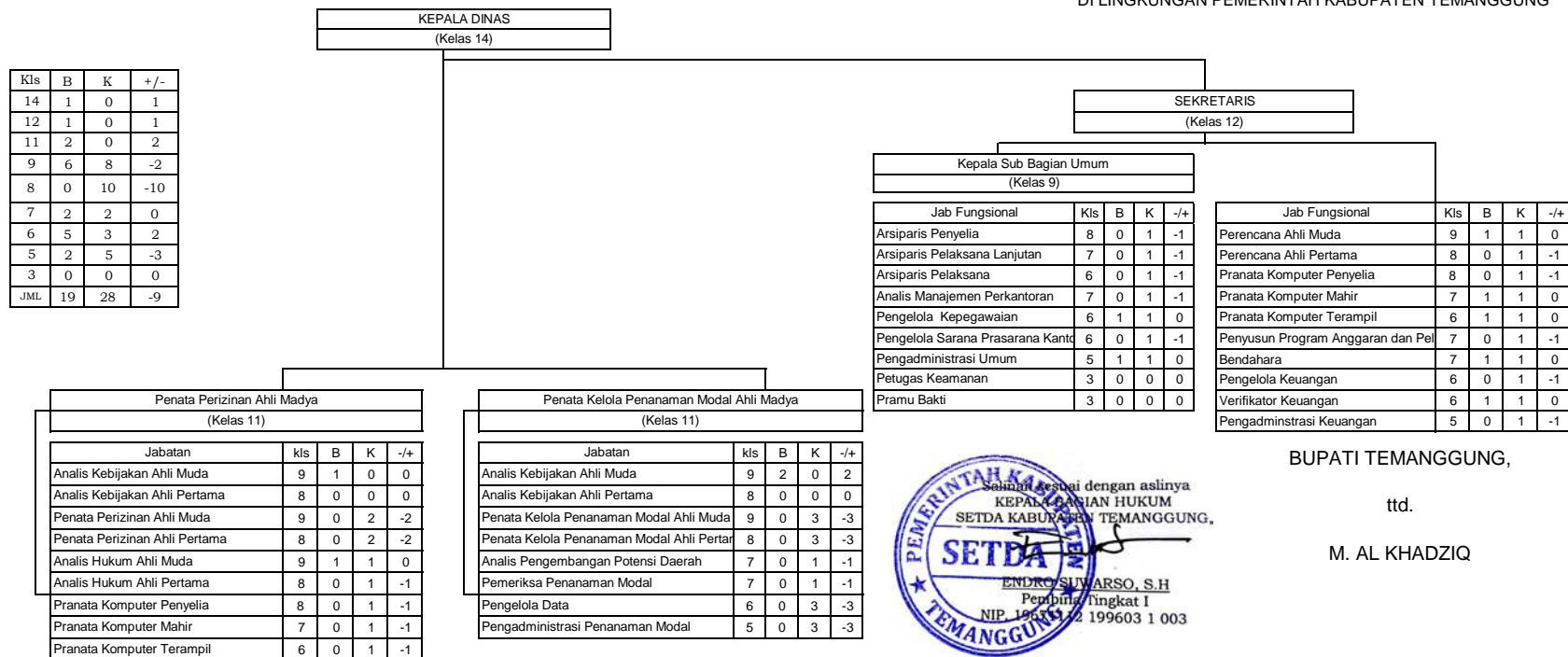
ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



PETA JABATAN
BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI

KEPALA
Kelas 14

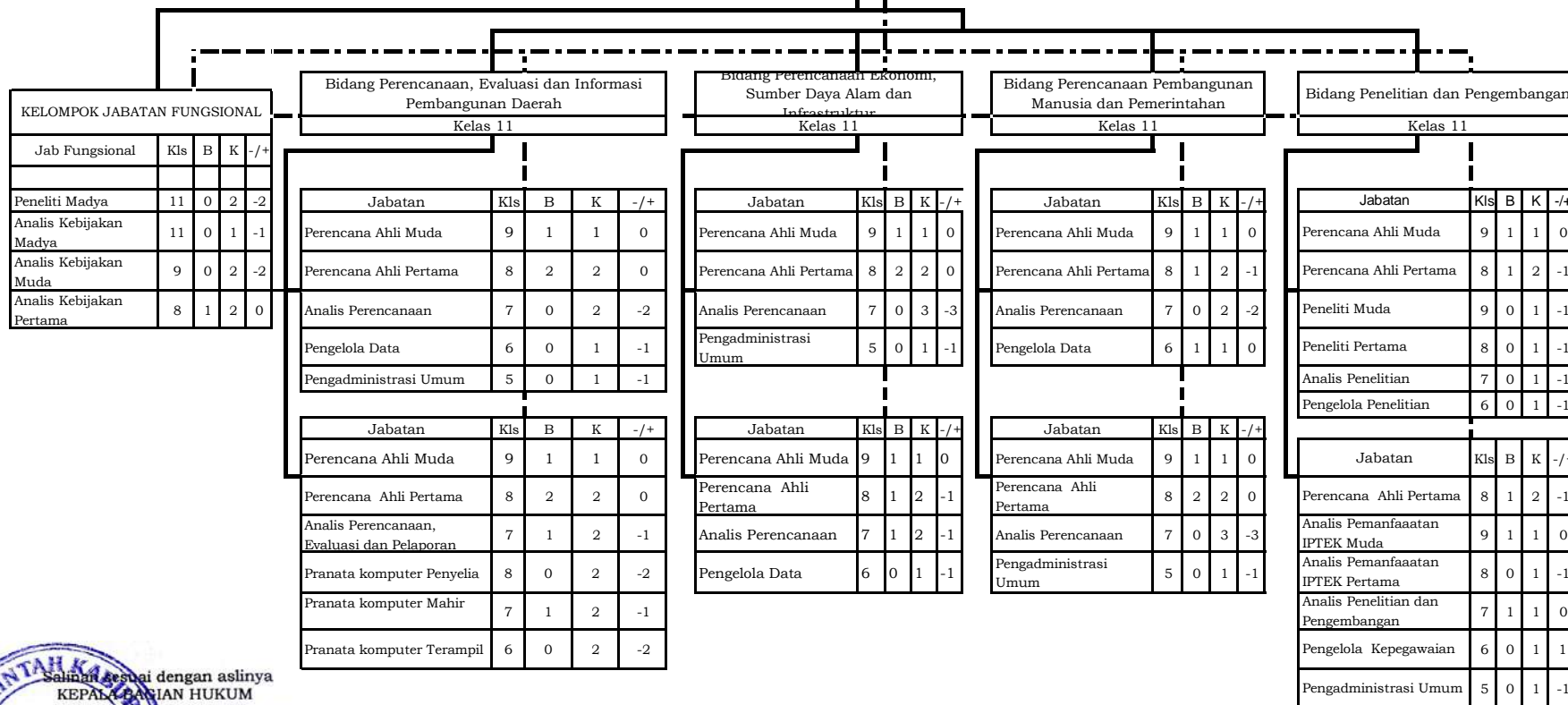
| REKAPITULASI | | | | |
|--------------|----|----|-----|--|
| Kls | B | K | -/+ | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | | | | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | | | 0 | |
| 9 | 10 | 11 | -1 | |
| 8 | 13 | 24 | -11 | |
| 7 | 6 | 23 | -17 | |
| 6 | 3 | 12 | -9 | |
| 5 | 3 | 7 | -4 | |
| 4 | | | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jml | 38 | 80 | -42 | |

SEKRETARIS
Kelas 12

| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
|--|-----|---|---|-----|
| Perencana Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perencana Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |

| Sub Bagian Keuangan Kelas 9 | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|-----|
| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
| Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Keuangan | 6 | 1 | 1 | -1 |
| Verifikator Keuangan | 6 | 1 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Keuangan | 5 | 0 | 1 | -1 |

| Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kelas 9 | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Jabatan | Kls | B | K | -/+ |
| Arsiparis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Analisis Manajemen | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Pengelola Kepegawaian | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Pramu Bakti | 3 | 1 | 0 | -3 |



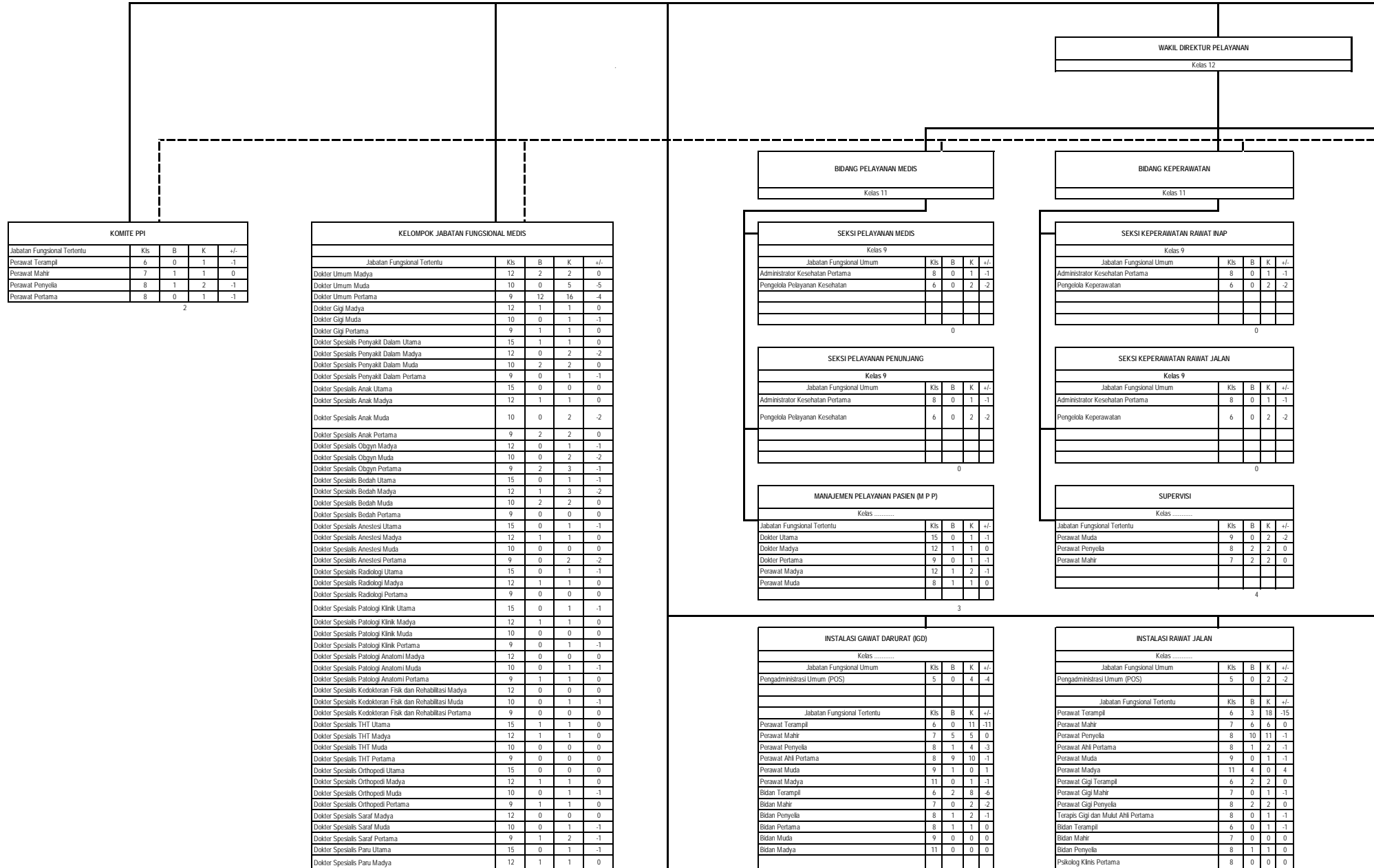
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| Dokter Spesialis Paru Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Paru Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Kulit Kelamin Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Kulit Kelamin Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Kulit Kelamin Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Gigi Anak Utama | 15 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Gigi Anak Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Spesialis Gigi Anak Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Gigi Anak Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodontisi Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodontisi Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodontisi Pertama | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Spesialis Urologi Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Urologi Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Urologi Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Mata Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Mata Muda | 10 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Mata Pertama | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Bedah Anak Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Anak Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Anak Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Bedah Onkologi Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Onkologi Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Onkologi Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Bedah Syaraf Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Syaraf Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Bedah Syaraf Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Dokter Spesialis Gizi Klinik Madya | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Gizi Klinik Muda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Spesialis Gizi Klinik Pertama | 9 | 0 | 1 | -1 |

40

20

| | | | | |
|--------------------------------|----|---|---|----|
| Psikolog Klinis Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Psikolog Klinis Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Refraksionis Optisien Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

30

| INSTALASI LABORATORIUM | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 4 | -4 |
| Pengjaba Laboratorium | 6 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Pranata Lab Kes Terampil | 6 | 3 | 9 | -6 |
| Pranata Lab Kes Mahir | 7 | 2 | 4 | -2 |
| Pranata Lab Kes Penyela | 8 | 6 | 9 | -3 |
| Pranata Lab Kes Ahli Pertama | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Lab Kes Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Lab Kes Ahli Madya | 11 | 1 | 2 | -1 |
| Teknisi Transfusi Darah | 6 | 1 | 3 | -2 |

15

| INSTALASI RADIOLOGI | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 2 | -1 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Radiografer Terampil | 6 | 2 | 3 | -1 |
| Radiografer Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Radiografer Penyela | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Radiografer Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Radiografer Ahli Muda | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Radiografer Ahli Madya | 11 | 1 | 2 | -1 |
| Fisikawan Medik Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |

8

| INSTALASI REKAM MEDIS | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengelola Data | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi | 5 | 0 | 16 | -16 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Perekam Medik Terampil | 12 | 7 | 16 | -9 |
| Perekam Medik Mahir | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Perekam Medik Penyela | 8 | 1 | 4 | -3 |
| Perekam Medik Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Perekam Medik Muda | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Perekam Medik Madya | 6 | 1 | 1 | 0 |

15

| INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Pranata Komputer Terampil | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pranata Komputer Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Pranata Komputer Penyela | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Pranata Komputer Pertama (Programer) | 8 | 0 | 15 | -15 |

2

| INSTALASI GIZI | | | | |
|-----------------------------|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pranata Jamuan | 5 | 6 | 19 | -13 |
| Pengolah Makanan | 6 | 2 | 15 | -13 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Nutrisionis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Nutrisionis Mahir | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrisionis Penyela | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Nutrisionis Ahli Pertama | 8 | 3 | 4 | -1 |
| Nutrisionis Ahli Muda | 9 | 2 | 3 | -1 |
| Nutrisionis Ahli Madya | 12 | 0 | 2 | -2 |

17

| INSTALASI CSSD | | | | |
|---|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum (Peluang Sterilisasi) | 5 | 0 | 13 | -13 |
| Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik | 6 | 1 | 1 | 0 |

1

| INSTALASI REHABILITASI MEDIS | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Fisioterapis Terampil | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Fisioterapis Mahir | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapis Penyela | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapis Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Fisioterapis Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Fisioterapis Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Wicara Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Terapis Wicara Mahir | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Terapis Wicara Penyela | 8 | 0 | 1 | -1 |
| Okupasi Terapis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |

5

| INSTALASI FARMASI | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Gudang Farmasi | 5 | 1 | 2 | -1 |
| Pengelola Instalasi | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Pengadministrasi Umum (Porter Oksigen) | 5 | 0 | -4 | -4 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Asisten Apoteker Terampil | 6 | 0 | -10 | -10 |
| Asisten Apoteker Mahir | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 6 | 12 | -6 |
| Apoteker Pertama | 8 | 10 | 19 | -9 |
| Apoteker Muda | 9 | 4 | 7 | -3 |
| Apoteker Ahli Madya | 11 | 0 | 2 | -2 |
| | | | | |
| | | | | |

29

| Perawat Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
|-----------------------------|-----|----|---|-----|
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Ahli Pertama | 8 | 3 | 4 | -1 |
| Perawat Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| | | 8 | | |
| RUANG PICU NICU | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum (POS) | 6 | 0 | 1 | -1 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Perawat Terampil | 6 | 0 | 7 | -7 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Ahli Pertama | 8 | 5 | 7 | -2 |
| Perawat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Madya | 11 | 1 | 1 | 0 |
| | | 10 | | |
| RUANG HCU | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum (POS) | 6 | 0 | 1 | -1 |
| | | | | |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Perawat Terampil | 6 | 0 | 9 | -9 |
| Perawat Mahir | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Perawat Penyelia | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Perawat Ahli Pertama | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Perawat Ahli Muda | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Perawat Madya | 11 | 0 | 1 | -1 |

| INSTALASI HUMAS, INFORMASI DAN PEMASARAN | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | -3 | -3 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Pranata Humas Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 0 | 1 | -1 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 0 | 0 | 0 |

1

| INSTALASI IPSRS | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift | 4 | 3 | 7 | -4 |
| Teknisi Gedung | 4 | 0 | 5 | -5 |
| Pengadministrasi Umum | 5 | 0 | 1 | -1 |
| Pengelola Bangunan Gedung | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengelola Instalasi Air dan Listrik | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Teknik Elektromedik Penyelia | 8 | 1 | 2 | -1 |
| Teknik Elektromedik Mahir | 7 | 1 | 2 | -1 |
| Teknik Elektromedik Terampil | 6 | 3 | 5 | -2 |

8

| INSTALASI LAUNDRY | | | | |
|-----------------------------|-----|---|----|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Binatu Rumah Sakit | 3 | 5 | 20 | -15 |
| Pengelola Instalasi | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Sanitarian Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 |
| | | | | |
| | | | | |

6

| INSTALASI SANITASI | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| Kelas | | | | |
| Jabatan Fungsional Umum | Kls | B | K | +/- |
| Pengelola Limbah | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | Kls | B | K | +/- |
| Sanitarian Ahli Pertama | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sanitarian Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitarian Mahir | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Sanitarian Terampil | 6 | 5 | 5 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

6

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan nilai dan bobot suatu jabatan di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi jabatan guna menentukan kelas jabatan bagi aparatur sipil negara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka menentukan kelas jabatan aparatur sipil negara;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kejelasan nilai dan bobot jabatan yang dianggap adil guna pemeringkatan jabatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pola dan standar dalam pemeringkatan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kelas Jabatan bagi jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| I | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 1 | Sekretaris Daerah | 15 |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 14 |
| 3 | Kepala Bagian Pemerintahan | 12 |
| 4 | Analisis Pemerintah Daerah | 7 |
| 5 | Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah | 7 |
| 6 | Pengelola Data | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasian Pemerintahan | 5 |
| 9 | Pengadministrasian Otonomi Daerah | 5 |
| 10 | Kepala Bagian Hukum | 12 |
| 11 | Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 7 |
| 12 | Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum | 7 |
| 13 | Penyusun Bahan Bantuan Hukum | 7 |
| 14 | Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum | 6 |
| 15 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 16 | Pengelola Data | 6 |
| 17 | Pengadministrasian Hukum | 5 |
| 18 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental | 12 |
| 19 | Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan | 7 |
| 20 | Analisis Sarana Prasarana Ibadah | 7 |
| 21 | Analisis Kesejahteraan Rakyat | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 22 | Pengelola Bantuan Keagamaan | 6 |
| 23 | Pengelola Data | 6 |
| 24 | Pengelola Bantuan Keagamaan | 6 |
| 25 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 26 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 27 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 14 |
| 28 | Kepala Bagian Perekonomian | 12 |
| 29 | Analisis Perekonomian | 7 |
| 30 | Penelaah Perkembangan BUMD | 7 |
| 31 | Pengelola Data | 6 |
| 32 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 33 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 34 | Kepala Bagian Pembangunan | 12 |
| 35 | Analisis Pembangunan | 7 |
| 36 | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 7 |
| 37 | Pengelola Program dan Kegiatan | 6 |
| 38 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 39 | Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 6 |
| 40 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 41 | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa | 12 |
| 42 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa | 9 |
| 43 | Pengelola Unit Layanan Pengadaan | 6 |
| 44 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 45 | Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 |
| 46 | Kepala Sub Bagian LPSE dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 9 |
| 47 | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa | 7 |
| 48 | Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 49 | Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 |
| 50 | Asisten Administrasi Umum | 14 |
| 51 | Kepala Bagian Umum | 12 |
| 52 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 53 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 54 | Bendahara | 7 |
| 55 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 56 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 57 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 58 | Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 9 |
| 59 | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | 7 |
| 60 | Pranata Jamuan | 6 |
| 61 | Pengelola Kendaraan | 6 |
| 62 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 63 | Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor | 5 |
| 64 | Teknisi Peralatan Kantor | 5 |
| 65 | Pengemudi | 3 |
| 66 | Pramubakti | 3 |
| 67 | Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 9 |
| 68 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 69 | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | 7 |
| 70 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 71 | Pengelola Perjalanan Dinas | 6 |
| 72 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 73 | Sekretaris | 6 |
| 74 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | 5 |
| 75 | Pengadministrasi Persuratan | 5 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|---|---------------|
| 76 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 77 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 78 | Kepala Bagian Organisasi | 12 |
| 79 | Analisis Kelembagaan | 7 |
| 80 | Analisis Jabatan | 7 |
| 81 | Analisis Pelayanan Publik | 7 |
| 82 | Analisis Tata Laksana | 7 |
| 83 | Pengolah Data Kelembagaan | 6 |
| 84 | Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana | 6 |
| 85 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 86 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 87 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 12 |
| 88 | Kepala Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan | 9 |
| 89 | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | 7 |
| 90 | Analisis Protokol | 7 |
| 91 | Analisis Berita | 7 |
| 92 | Analisis Publikasi | 7 |
| 93 | Ajudan | 6 |
| 94 | Pengemudi VIP | 5 |
| 95 | Petugas Protokol | 6 |
| 96 | Penata Peliputan | 6 |
| 97 | Pengelola Perjalanan Dinas | 6 |
| 98 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 99 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 100 | Sub Bagian Komunikasi Pimpinan | 9 |
| 101 | Analisis Data dan Informasi | 7 |
| 102 | Pengelola Data | 6 |
| 103 | Pengelola Dokumentasi | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 104 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| | | |
| | STAF AHLI BUPATI | |
| 1 | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup | 13 |
| 2 | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 13 |
| 3 | Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan | 13 |
| | | |
| II | SEKRETARIAT DPRD | |
| 1 | Sekretaris DPRD | 14 |
| 2 | Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat | 11 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 9 |
| 4 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 5 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 6 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 7 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 8 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 9 |
| 9 | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | 7 |
| 10 | Analisis Publikasi | 7 |
| 11 | Penata Liputan | 6 |
| 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 13 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 14 | Pengemudi | 3 |
| 15 | Pramubakti | 3 |
| 16 | Kepala Bagian Keuangan | 11 |
| 17 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 18 | Penyusun Laporan Keuangan | 7 |
| 19 | Analisis Perencana | 7 |
| 20 | Bendahara | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 21 | Pengelola Program dan Kegiatan | 6 |
| 22 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 23 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 24 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 25 | Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan | 11 |
| 26 | Penyusun Risalah | 7 |
| 27 | Analisis Hukum | 7 |
| 28 | Analisis Legislasi | 7 |
| 29 | Pengelola Data | 6 |
| 30 | Pengelola Dokumen dan Informasi | 6 |
| 31 | Pengelola Persidangan | 6 |
| 32 | Pengadministrasi Hukum | 5 |
| 33 | Pengadministrasi Data Perundang-undangan | 5 |
| 34 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| | | |
| III | INSPEKTORAT | |
| 1 | Inspektur | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 7 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 10 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 11 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 13 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 14 | Pengemudi | 3 |
| 15 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 9 |
| 16 | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 7 |
| 17 | Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | 6 |
| 18 | Inspektur Pembantu | 11 |
| 19 | Inspektur Pembantu Khusus | 11 |
| | | |
| IV | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengelola Program dan Kegiatan | 6 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 15 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 16 | Pengadministrasi Persuratan | 5 |
| 17 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 18 | Pramubakti | 3 |
| 19 | Pengemudi | 3 |
| 20 | Petugas Keamanan | 3 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 21 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | 11 |
| 22 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 23 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar | 6 |
| 24 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 |
| 25 | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | 9 |
| 26 | Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7 |
| 27 | Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 |
| 28 | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 |
| 29 | Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar | 9 |
| 30 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 |
| 31 | Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah | 6 |
| 32 | Pengadministrasi Kependidikan | 5 |
| 33 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | 11 |
| 34 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 35 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pertama | 6 |
| 36 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 |
| 37 | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | 9 |
| 38 | Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7 |
| 39 | Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 |
| 40 | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 |
| 41 | Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 9 |
| 42 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 |
| 43 | Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah | 6 |
| 44 | Pengadministrasi Kependidikan | 5 |
| 45 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini | 11 |
| 46 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 47 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 48 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 |
| 49 | Kepala Seksi Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9 |
| 50 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran | 7 |
| 51 | Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6 |
| 52 | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 |
| 53 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal | 11 |
| 54 | Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat | 9 |
| 55 | Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat | 7 |
| 56 | Pengelola Pengendalian Masyarakat | 6 |
| 57 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 58 | Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan | 9 |
| 59 | Analisis Kursus dan Kesetaraan | 7 |
| 60 | Pengelola Pendidikan | 6 |
| 61 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 62 | Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 11 |
| 63 | Pengelola Sarana Olahraga | 6 |
| 64 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 |
| 65 | Pramu Kebersihan | 3 |
| 66 | Kepala Seksi Kepemudaan | 9 |
| 67 | Analisis Kepemudaan | 7 |
| 68 | Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasvarakatan | 6 |
| 69 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 70 | Kepala Seksi Olah Raga | 9 |
| 71 | Analisis Keolahragaan | 7 |
| 72 | Pengawas Olah Raga | 6 |
| 73 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 74 | Koordinator | 8 |
| | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | |
| 75 | Bendahara | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 76 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 77 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 78 | Pramu Kebersihan | 3 |
| | | |
| | SATUAN PENDIDIKAN | |
| 79 | Analisis Tata Usaha | 7 |
| 80 | Bendahara | 6 |
| 81 | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah | 6 |
| 82 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 83 | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5 |
| | | |
| V | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 15 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 16 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 17 | Pramubakti | 3 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 18 | Pengemudi | 3 |
| 19 | Petugas Keamanan | 3 |
| 20 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | 11 |
| 21 | Analisis Gizi | 7 |
| 22 | Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 23 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | 11 |
| 24 | Analisis Obat dan Makanan | 7 |
| 25 | Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan | 6 |
| 26 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 27 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 28 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 11 |
| 29 | Analisis Kesehatan | 7 |
| 30 | Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 31 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 32 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | 11 |
| 33 | Analisis Kesehatan | 7 |
| 34 | Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 35 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 36 | Pengemudi Ambulance | 4 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 37 | Kepala UPT Laboratorium Kesehatan | 8 |
| 38 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 39 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 40 | Pramubakti | 3 |
| 41 | Pengemudi | 3 |
| 42 | Petugas Keamanan | 3 |
| | PUSKESMAS | |
| 43 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas | 8 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 44 | Bendahara | 6 |
| 45 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 46 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 47 | Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi | 5 |
| 48 | Pengadminstrasi Keuangan | 5 |
| 49 | Pengadminstrasi Kepegawaian | 5 |
| 50 | Pengadminstrasi Barang | 5 |
| 51 | Pengemudi Ambulance | 4 |
| 52 | Petugas Keamanan | 3 |
| 53 | Pramubakti | 3 |
| 54 | Juru Masak | 3 |
| 55 | Juru Cuci | 3 |
| | | |
| VI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Bina Marga | 11 |
| 18 | Penilik Jalan | 7 |
| 19 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | 7 |
| 20 | Pengawas Jalan dan Jembatan | 7 |
| 21 | Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan | 6 |
| 22 | Pengelola Pemeliharaan Jalan | 6 |
| 23 | Pengelola pembangunan dan Peningkatan Jalan | 6 |
| 24 | Operator Alat Berat | 5 |
| 25 | Teknisi Peralatan Dan Mesin | 5 |
| 26 | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 11 |
| 27 | Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air | 7 |
| 28 | Pengawas Irigasi | 7 |
| 29 | Pemeriksa Irigasi | 7 |
| 30 | Pengelola Irigasi | 6 |
| 31 | Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 6 |
| 32 | Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air | 6 |
| 33 | Kepala Bidang Cipta Karya | 11 |
| 34 | Analisis Potensi Sumber Air Tanah | 7 |
| 35 | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 36 | Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | 7 |
| 37 | Pengawas Jaringan Utilitas | 7 |
| 38 | Pengelola Kesehatan Lingkungan | 6 |
| 39 | Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan | 6 |
| 40 | Pengelola Jasa Konstruksi | 6 |
| 41 | Kepala Bidang Penataan Ruang | 11 |
| 42 | Analisis Tata Ruang | 7 |
| 43 | Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-------|---|---------------|
| 44 | Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi | 7 |
| 45 | Pengawas Tata Ruang | 7 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 46 | Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan | 9 |
| 47 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 |
| 48 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 49 | Teknisi Sipil | 5 |
| 50 | Pemelihara Jalan | 5 |
| 51 | Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | 5 |
| 52 | Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana | 5 |
| 53 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 54 | Pramubakti | 3 |
| | | |
| XVIII | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Penyusun Laporan Kebijakan | 7 |
| 13 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 14 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 15 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 16 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 17 | Pengadministrasi Persuratan | 5 |
| 18 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 19 | Pramubakti | 3 |
| 20 | Pengemudi | 3 |
| 21 | Petugas Keamanan | 3 |
| 22 | Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 11 |
| 23 | Analisis Peta Wilayah | 7 |
| 24 | Analisis Pertanahan | 7 |
| 25 | Penata Bangunan Gedung dan Permukiman | 6 |
| 26 | Pengelola Perumahan dan Permukiman | 6 |
| 27 | Pengelola Survey Pengukuran dan Pemetaan | 6 |
| 28 | Pengadministrasi Pertanahan | 5 |
| 29 | Kepala Bidang Tata Lingkungan | 11 |
| 30 | Analisis Lingkungan Hidup | 7 |
| 31 | Pengelola Lingkungan | 6 |
| 32 | Pengelola Dokumen Perizinan | 6 |
| 33 | Analisis Taman | 7 |
| 34 | Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan | 7 |
| 35 | Analisis Lingkungan Hidup | 7 |
| 36 | Pengelola Sarana dan Prasarana Taman | 6 |
| 37 | Pengelola Lingkungan | 6 |
| 38 | Pramu Taman | 5 |
| 39 | Pranata Taman | 3 |
| 40 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 11 |
| 41 | Analisis Lingkungan Hidup | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 42 | Pengelola Lingkungan | 6 |
| 43 | Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan | 11 |
| 44 | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan | 7 |
| 45 | Pengelola Penataan Sampah | 6 |
| 46 | Pengadministrasi Karcis | 5 |
| 47 | Teknisi Mesin | 5 |
| 48 | Pengemudi | 3 |
| 49 | Pramu Kebersihan | 3 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 50 | Kepala UPT Rusunawa | 9 |
| 51 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 |
| 52 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 53 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 54 | Pengelola Pemasaran | 6 |
| 55 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 56 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 57 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 5 |
| 58 | Teknisi Sipil | 5 |
| 59 | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 |
| 60 | Teknisi Gedung/Bangunan | 5 |
| 61 | Pramubakti | 3 |
| 62 | Kepala UPT Laboratorium Lingkungan | 8 |
| 63 | Analisis Kimia | 7 |
| 64 | Pranata Laboratorium | 6 |
| 65 | Pengelola Laboratorium | 6 |
| 66 | Teknisi Laboratorium | 5 |
| 67 | Petugas Pengambil Contoh | 5 |
| 68 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 69 | Pengemudi | 3 |
| 70 | Pramu Bhakti | 3 |
| 71 | Petugas Keamanan | 3 |
| 72 | Kepala UPT TPA dan IPLT | 9 |
| 73 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 8 |
| 74 | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA | 7 |
| 75 | Analisis Lingkungan Hidup | 7 |
| 76 | Pengelola Penataan Sampah | 6 |
| 77 | Operator Alat Berat | 5 |
| 78 | Operator Mesin | 5 |
| 79 | Teknisi Mesin | 5 |
| 80 | Pramu Kebersihan | 3 |
| 81 | Pengemudi | 3 |
| | | |
| VII | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| 1 | Kepala | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|--|---------------|
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 11 |
| 18 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 9 |
| 19 | Pengendali Teknis Keamanan | 7 |
| 20 | Pengelola Keamanan dan Ketertiban | 6 |
| 21 | Pranata Tata Praja | 5 |
| 22 | Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | 9 |
| 23 | Penyidik | 7 |
| 24 | Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi | 6 |
| 25 | Pranata Tatapraja | 5 |
| 26 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | 9 |
| 27 | Analisis Perlindungan Masyarakat | 7 |
| 28 | Pengelola Data | 6 |
| 29 | Pranata Perlindungan Masyarakat | 5 |
| 30 | Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat | 5 |
| 31 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran | 11 |
| 32 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan | 9 |
| 33 | Analisis Kebakaran | 7 |
| 34 | Analisis Mitigasi Bencana | 7 |
| 35 | Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran | 9 |
| 36 | Pranata Pemadam Kebakaran | 6 |
| 37 | Pranata Bencana | 6 |
| 38 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 5 |
| 39 | Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran | 5 |
| | | |
| VIII | DINAS SOSIAL | |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 11 |
| 18 | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah | 6 |
| 19 | Pengelola Perlindungan Sosial | 6 |
| 20 | Pengelola Jaminan Sosial | 6 |
| 21 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | 11 |
| 22 | Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia | 6 |
| 23 | Pengelola Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial | 6 |
| 24 | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah | 6 |
| 25 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | 11 |
| 26 | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah | 6 |
| 27 | Pengelola Pemberdayaan Sosial | 6 |
| 28 | Pramu Pemakaman | 3 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 29 | Kepala UPT Rumah Singgah | 8 |
| 30 | Pengelola Sarana Prasarana | 6 |
| 31 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| | | |
| X | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11 |
| 18 | Analisis Perlindungan Perempuan | 7 |
| 19 | Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 7 |
| 20 | Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender | 6 |
| 21 | Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak | 6 |
| 22 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 11 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 23 | Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana | 7 |
| 24 | Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga | 7 |
| 25 | Pengelola Data Pengendalian Masyarakat | 6 |
| 26 | Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga | 6 |
| 27 | Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana | 11 |
| 28 | Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana | 7 |
| 29 | Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana | 7 |
| 30 | Analisis Keluarga Berencana | 7 |
| 31 | Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 6 |
| 32 | Pengadministrasian Alat dan Obat Kontrasepsi | 5 |
| | | |
| XX | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 15 | Pengadministrasian Kepegawaian | 5 |
| 16 | Pengadministrasian Persuratan | 5 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 17 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 18 | Pramubakti | 3 |
| 19 | Pengemudi | 3 |
| 20 | Petugas Keamanan | 3 |
| 21 | Kepala Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian | 11 |
| 22 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 23 | Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi | 7 |
| 24 | Analisis Lahan Pertanian | 7 |
| 25 | Pengawas pupuk dan pestisida | 7 |
| 26 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 27 | Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan | 6 |
| 28 | Kepala Bidang Penyuluhan | 11 |
| 29 | Analisis Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan | 7 |
| 30 | Analisis Program Penyuluhan | 7 |
| 31 | Pengelola Database Profesi SDM Pertanian | 6 |
| 32 | Pengelola Database kelembagaan petani | 6 |
| 33 | Penyuluh Pertanian Pelaksana | 6 |
| 34 | Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Pangan | 11 |
| 35 | Pengelola Ketahanan Pangan | 6 |
| 36 | Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan | 6 |
| 37 | Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan | 11 |
| 38 | Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura | 6 |
| 39 | Pengelola Penilai Usaha Perkebunan | 6 |
| 40 | Kepala Bidang Peternakan | 11 |
| 41 | Analisis Kerjasama dan Permodalan | 7 |
| 42 | Pengelola Peternakan | 6 |
| 43 | Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya | 6 |
| 44 | Kepala Bidang Perikanan | 11 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 45 | Pengelola Statistik Perikanan | 6 |
| 46 | Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan | 6 |
| 47 | Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan | 6 |
| 48 | Teknisi Pemeliharaan sarana dan prasarana | 5 |
| 49 | Pemelihara sarana dan prasarana | 3 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 50 | Kepala UPT Balai Benih Pertanian | 9 |
| 51 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Pertanian | 8 |
| 52 | Pengelola Teknologi Perbenihan | 6 |
| 53 | Pranata Pengembangan Bibit Tanaman | 4 |
| 54 | Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan | 9 |
| 55 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan | 8 |
| 56 | Pengelola UPT Pasar Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan | 6 |
| 57 | Penagih Retribusi | 4 |
| 58 | Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan | 9 |
| 59 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan | 8 |
| 60 | Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas | 6 |
| 61 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 5 |
| | | |
| XI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 10 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 11 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 12 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 13 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 14 | Pengemudi | 3 |
| 15 | Pramubakti | 3 |
| 16 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 11 |
| 17 | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 |
| 18 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 11 |
| 19 | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 |
| 20 | Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian | 5 |
| 21 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 11 |
| 22 | Analisis Pelayanan | 7 |
| 23 | Pengolah Data | 6 |
| | | |
| XII | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11 |
| 18 | Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 7 |
| 19 | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan | 7 |
| 20 | Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat | 7 |
| 21 | Penelaah Pengembangan Usaha | 7 |
| 22 | Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga | 6 |
| 23 | Pengelola Data | 6 |
| 24 | Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi | 6 |
| 25 | Pengadministrasian Sarana Pengembangan Usaha | 5 |
| 26 | Pengadministrasian Program dan Kerjasama | 5 |
| 27 | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa | 11 |
| 28 | Analisis Pembangunan Desa | 7 |
| 29 | Analisis Data dan Informasi | 7 |
| 30 | Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan | 7 |
| 31 | Analisis Pemberdayaan Masyarakat | 7 |
| 32 | Analisis Desa | 7 |
| 33 | Analisis Keuangan | 7 |
| 34 | Pengelola Data | 6 |
| 35 | Pengelola Transfer | 6 |
| 36 | Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|--|---------------|
| 37 | Pengolah Data Laporan Keuangan | 6 |
| 38 | Pengadministrasi persuratan | 5 |
| 39 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa | 11 |
| 40 | Analisis Desa dan Kelurahan | 7 |
| 41 | Pengelola Administrasi Pemerintahan | 6 |
| 42 | Pengelola Data | 6 |
| 43 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 |
| 44 | Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 6 |
| 45 | Pengadministrasi Pemerintahan | 5 |
| | | |
| XVII | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan | 11 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 18 | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan | 9 |
| 19 | Analisis Lalu Lintas | 7 |
| 20 | Analisis Angkutan Darat | 7 |
| 21 | Pengawas dan Pembina Angkutan | 7 |
| 22 | Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan | 6 |
| 23 | Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan | 5 |
| 24 | Pengelola Angkutan Kendaraan | 6 |
| 25 | Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan | 6 |
| 26 | Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan | 5 |
| 27 | Pengadministrasian LLAJ | 5 |
| 28 | Pengemudi Bus | 3 |
| 29 | Kepala Seksi Perparkiran dan Terminal | 9 |
| 30 | Analisis Pendapatan Daerah | 7 |
| 31 | Pengawas Terminal | 7 |
| 32 | Pengelola Terminal | 6 |
| 33 | Pengelola Perparkiran | 6 |
| 34 | Pengadministrasian Karcis | 5 |
| 35 | Operator Terminal | 5 |
| 36 | Penagih Retribusi | 4 |
| 37 | Juru Pungut Retribusi | 4 |
| 38 | Petugas Keamanan | 3 |
| 39 | Pramu Kebersihan | 3 |
| 40 | Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan PJU | 11 |
| 41 | Kepala Seksi Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan | 9 |
| 42 | Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor | 6 |
| 43 | Pengolah Data | 6 |
| 44 | Pengadministrasian PKB | 5 |
| 45 | Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum | 9 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|---|---------------|
| 46 | Analisis Ketenagalistrikan | 7 |
| 47 | Pemelihara Penerangan Jalan | 5 |
| 48 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 49 | Pengemudi | 3 |
| | | |
| XVI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 11 |
| 18 | Jurnalis | 6 |
| 19 | Pengelola Media Center dan Kemitraan Media | 6 |
| 20 | Analisis Data dan Informasi | 7 |
| 21 | Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi | 7 |
| 22 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 23 | Pengolah Konten Media Sosial | 6 |
| 24 | Pengelola Dokumentasi | 6 |
| 25 | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 11 |
| 26 | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | 7 |
| 27 | Kepala Bidang Statistik dan Persandian | 11 |
| 28 | Analisis Statistik | 7 |
| 29 | Pengelola Geospasial | 6 |
| 30 | Operator Sandi dan Telekomunikasi | 6 |
| | | |
| XIV | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro | 11 |
| 18 | Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|---|---------------|
| 19 | Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah | 6 |
| 20 | Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi | 6 |
| 21 | Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop | 6 |
| 22 | Kepala Bidang Perdagangan | 11 |
| 23 | Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah | 6 |
| 24 | Pengelola Pameran dan Peragaan | 6 |
| 25 | Kepala Bidang Pengelolaan Pasar | 11 |
| 26 | Analisis Pengembangan Pasar | 7 |
| 27 | Analisis Pendapatan Daerah | 7 |
| 28 | Pengelola Pasar | 6 |
| 29 | Pengelola Pendapatan | 6 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 30 | Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah | 9 |
| 31 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah | 8 |
| 32 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 33 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 34 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 35 | Teknisi Jaringan Instalasi | 5 |
| 36 | Juru Pungut Retribusi | 3 |
| 37 | Pramu Kebersihan | 3 |
| 38 | Kepala UPT Metrologi Legal | 8 |
| 39 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 40 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| | | |
| XIII | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi | 11 |
| 18 | Analisis Pengembangan Potensi Daerah | 7 |
| 19 | Fasilitator Promosi | 7 |
| 20 | Pengelola Data | 6 |
| 21 | Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor | 6 |
| 22 | Pengadministrasian Perizinan | 5 |
| 23 | Kepala Bidang Perizinan | 11 |
| 24 | Analisis Perizinan | 7 |
| 25 | Pengawas Penanaman Modal | 7 |
| 26 | Pengelola Dokumen Perizinan | 6 |
| 27 | Pengelola Data Laporan dan Pengaduan | 6 |
| 28 | Pengadministrasi Perizinan | 5 |
| 29 | Pengadministrasian Pengaduan Publik | 5 |
| | | |
| IX | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Kebudayaan | 11 |
| 18 | Analisis Nilai Budaya | 7 |
| 19 | Analisis Sumber Sejarah | 7 |
| 20 | Analisis Bahasa dan Sastra | 7 |
| 21 | Analisis Kesenian dan Budaya Daerah | 7 |
| 22 | Pengelola Data Nilai Budaya | 6 |
| 23 | Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah | 5 |
| 24 | Kepala Bidang Pariwisata | 11 |
| 25 | Analisis Pariwisata | 7 |
| 26 | Analisis Ekonomi Kreatif | 7 |
| 27 | Penyuluh Wisata | 7 |
| 28 | Pengelola Promosi dan Informasi Wisata | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 29 | Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata | 6 |
| 30 | Pengelola Informasi Kepariwisataaan | 6 |
| 31 | Pengelola Usaha Kepariwisataaan | 6 |
| | | |
| XXI | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Perpustakaan | 11 |
| 18 | Kepala Bidang Kearsipan | 11 |
| | | |
| XV | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| 1 | Kepala Dinas | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja | 11 |
| 18 | Analisis Bahan Pelatihan dan Produktifitas Kerja | 7 |
| 19 | Analisis Tenaga Kerja | 7 |
| 20 | Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia | 6 |
| 21 | Pengelola Ketrasmigrasian | 6 |
| 22 | Pengelola Penempatan Tenaga Kerja Indonesia | 6 |
| 23 | Pengadministrasi Pelatihan | 5 |
| 24 | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja | 11 |
| 25 | Analisis Bahan Persyaratan Kerja | 7 |
| 26 | Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 7 |
| 27 | Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 6 |
| 28 | Pengelola Tenaga Kerja Indonesia | 6 |
| 29 | Kepala Bidang Perindustrian | 11 |
| 30 | Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri | 7 |
| 31 | Analisis Industri | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|---|---------------|
| 32 | Analisis Teknologi Industri | 7 |
| 33 | Pengelola Industri | 6 |
| | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| 34 | Kepala UPT Balai Latihan Kerja | 9 |
| 35 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja | 8 |
| 36 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 37 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 38 | Pengolah Data | 6 |
| 39 | Pengadministrasian Pelatihan | 5 |
| 40 | Pengadministrasian Kerjasama Pelatihan | 5 |
| | | |
| XXII | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 1 | Kepala Badan | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 15 | Pengadministrasian Kepegawaian | 5 |
| 16 | Pengadministrasian Persuratan | 5 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-------|--|---------------|
| 17 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 18 | Pramubakti | 3 |
| 19 | Pengemudi | 3 |
| 20 | Petugas Keamanan | 3 |
| 21 | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah | 11 |
| 22 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 7 |
| 23 | Analisis Perencanaan | 7 |
| 24 | Pengelola Data | 6 |
| 25 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 26 | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur | 11 |
| 27 | Analisis Perencanaan | 7 |
| 28 | Pengolah Data | 6 |
| 29 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 30 | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan | 11 |
| 31 | Analisis Perencanaan | 7 |
| 32 | Pengolah Data | 6 |
| 33 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 34 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | 11 |
| 35 | Analisis Penelitian | 7 |
| 36 | Analisis Penelitian dan Pengembangan | 7 |
| 37 | Pengelola Penelitian | 6 |
| 38 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 39 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| | | |
| XXIII | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 1 | Kepala Badan | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 9 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 |
| 7 | Bendahara | 7 |
| 8 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 9 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 10 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 12 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 15 | Pengadministrasi Kepegawaian | 5 |
| 16 | Pengadministrasi Persuratan | 5 |
| 17 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 18 | Pramubakti | 3 |
| 19 | Pengemudi | 3 |
| 20 | Petugas Keamanan | 3 |
| 21 | Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan | 11 |
| 22 | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan | 9 |
| 23 | Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan | 7 |
| 24 | Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi | 6 |
| 25 | Pengadministrasi Pajak | 5 |
| 26 | Kepala Sub Bidang Pengelola Data dan Penetapan | 9 |
| 27 | Analisis Pendapatan Daerah | 7 |
| 28 | Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah | 7 |
| 29 | Pengelola Pendapatan | 6 |
| 30 | Pengadministrasi Pajak | 5 |
| 31 | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian | 11 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 32 | Kepala Sub Bidang Penagihan | 9 |
| 33 | Analisis Penagihan Pajak | 7 |
| 34 | Pengelola Penagihan dan Pengawasan | 6 |
| 35 | Pengadministrasian Pajak | 5 |
| 36 | Penagih Retribusi/Pajak | 3 |
| 37 | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah | 9 |
| 38 | Analisis Penagihan dan Pengembalian | 7 |
| 39 | Analisis Pemeriksaan Pajak | 7 |
| 40 | Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan | 6 |
| 41 | Pengadministrasian Laporan Keuangan | 5 |
| 42 | Kepala Bidang Penganggaran | 11 |
| 43 | Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran | 9 |
| 44 | Analisis Kebijakan Penganggaran | 7 |
| 45 | Penata Keuangan | 7 |
| 46 | Pengelola Anggaran | 6 |
| 47 | Pengadministrasian Anggaran | 5 |
| 48 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | 9 |
| 49 | Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 7 |
| 50 | Pengolah Data Laporan Keuangan Transfer Daerah | 6 |
| 51 | Pengolah Data Kebijakan Pelaksanaan Anggaran | 6 |
| 52 | Pengadministrasian Anggaran | 5 |
| 53 | Kepala Bidang Perbendaharaan | 11 |
| 54 | Kepala Sub Bidang Pelayanan Belanja | 9 |
| 55 | Analisis Perbendaharaan | 7 |
| 56 | Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | 6 |
| 57 | Pengelola Database Surat Perintah Pembayaran | 6 |
| 58 | Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan | 6 |
| 59 | Pengelola Gaji | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 60 | Pengolah Daftar Gaji | 6 |
| 61 | Kepala Sub Bidang Kas Daerah | 9 |
| 62 | Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan | 7 |
| 63 | Analisis Pembiayaan dan Resiko Fiskal | 7 |
| 64 | Pengelola data Laporan Keuangan | 6 |
| 65 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 66 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 11 |
| 67 | Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah | 9 |
| 68 | Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah | 7 |
| 69 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 6 |
| 70 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 71 | Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah | 9 |
| 72 | Analisis Aset Negara | 7 |
| 73 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | 7 |
| 74 | Pengelola Sarana dan Prasarana | 6 |
| 75 | Pengadministrasian Sarana dan Prasarana | 5 |
| 76 | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 11 |
| 77 | Kepala Sub Bidang Akuntansi | 9 |
| 78 | Analisis Bimbingan Akuntansi | 7 |
| 79 | Analisis Laporan Keuangan | 7 |
| 80 | Pengelola Akuntansi | 6 |
| 81 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 82 | Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan | 9 |
| 83 | Analisis Laporan Keuangan | 7 |
| 84 | Penata Keuangan | 7 |
| 85 | Pengelola Data Keuangan Daerah | 6 |
| 86 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| | | |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|---|---------------|
| XXIV | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 1 | Kepala Badan | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Formasi dan Kepangkatan | 11 |
| 18 | Analisis Perencanaan SDMA | 7 |
| 19 | Analisis SDMA (Jab. Pelaksana) | 7 |
| 20 | Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai | 6 |
| 21 | Analisis Jabatan | 7 |
| 22 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 23 | Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Informasi Kepegawaian | 11 |
| 24 | Analisis Sistem Informasi | 7 |
| 25 | Analisis Pengembangan Karier | 7 |
| 26 | Penyusun Rencana Mutasi | 7 |
| 27 | Pengelola Kepegawaian | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|--|---------------|
| 28 | Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai | 11 |
| 29 | Analisis Diklat | 7 |
| 30 | Analisis Kompetensi | 7 |
| 31 | Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDMA | 7 |
| 32 | Analisis Kinerja | 7 |
| 33 | Pengelola Disiplin Pegawai | 6 |
| 34 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| | | |
| XXVI | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 1 | Kepala Badan | 14 |
| 2 | Sekretaris | 12 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9 |
| 4 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 8 | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Pengadministrasian Keuangan | 5 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 11 | Analisis Manajemen Perkantoran | 7 |
| 12 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 13 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 14 | Pengadministrasian Umum | 5 |
| 15 | Pengemudi | 3 |
| 16 | Pramubakti | 3 |
| 17 | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa | 11 |
| 18 | Analisis Forum Kerukunan Umat | 7 |
| 19 | Analisis Wawasan Kebangsaan | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-----|---|---------------|
| 20 | Analisis Keamanan | 7 |
| 21 | Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 7 |
| 22 | Pengelola Data | 6 |
| 23 | Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan | 11 |
| 24 | Analisis Politik Dalam Negeri | 7 |
| 25 | Analisis Politik Hukum dan Keamanan | 7 |
| 26 | Analisis Organisasi Masyarakat | 7 |
| 27 | Pengelola Data | 6 |
| | | |
| XXV | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 | Kepala Pelaksana Harian | 12 |
| 2 | Kepala Sekretariat | 9 |
| 3 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 |
| 4 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 7 |
| 5 | Bendahara | 7 |
| 6 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 7 | Pengelola Sarana Prasarana Kantor | 6 |
| 8 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 9 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 10 | Pengemudi | 3 |
| 11 | Pemelihara Sarana dan Prasarana | 3 |
| 12 | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 9 |
| 13 | Analisis Kesiapsiagaan | 7 |
| 14 | Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana | 6 |
| 15 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 16 | Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik | 9 |
| 17 | Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik | 7 |
| 18 | Analisis Bencana | 7 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|-------|---|---------------|
| 19 | Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik | 7 |
| 20 | Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanganan Bencana | 6 |
| 21 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 22 | Operator Mesin | 5 |
| 23 | Pengemudi | 3 |
| 24 | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 9 |
| 25 | Analisis Bencana | 7 |
| 26 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 27 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 28 | Pengemudi | 3 |
| | | |
| XXVII | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |
| 1 | Direktur | 14 |
| 2 | Wakil Direktur Pelayanan | 12 |
| 3 | Kepala Bidang Pelayanan Medis | 11 |
| 4 | Kepala Seksi Pelayanan Medis | 9 |
| 5 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 6 | Kepala Seksi Pelayanan Penunjang | 9 |
| 7 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 8 | Kepala Bidang Keperawatan | 11 |
| 9 | Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap | 9 |
| 10 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 11 | Pramubakti | 3 |
| 12 | Kepala Seksi Perawatan Rawat Jalan | 9 |
| 13 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 14 | Bidang Penunjang Medis dan Non Medis | 11 |
| 15 | Kepala Seksi Penunjang Medis | 9 |
| 16 | Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan | 6 |
| 17 | Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik | 6 |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|--------|---|---------------|
| 18 | Kepala Seksi Penunjang Non Medis | 9 |
| 19 | Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik | 6 |
| 20 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 21 | Wakil Direktur Umum dan Keuangan | 12 |
| 22 | Kepala Bidang Umum dan Perlengkapan | 11 |
| 23 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 9 |
| 24 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 25 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 26 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 9 |
| 27 | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 28 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 29 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 30 | Pengemudi Ambulan | 4 |
| 31 | Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan | 11 |
| 32 | Kepala Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 9 |
| 33 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 7 |
| 34 | Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelaporan | 9 |
| 35 | Analisis Diklat | 7 |
| 36 | Kepala Bidang Keuangan | 11 |
| 37 | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi | 9 |
| 38 | Bendahara | 7 |
| 39 | Analisis Penagihan dan Pengembalian | 7 |
| 40 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 41 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 42 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 43 | Kepala Sub Bagian Akuntansi | 9 |
| 44 | Analisis Sistem Akuntansi Instansi | 7 |
| | | |
| XXVIII | KECAMATAN | |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 1 | Camat | 12 |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | 11 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 8 |
| 4 | Bendahara | 6 |
| 5 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 6 | Pengelola Program dan Kegiatan | 6 |
| 7 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
| 8 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 5 |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 8 |
| 10 | Pengelola Kepegawaian | 6 |
| 11 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 12 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 13 | Pramu Bakti | 3 |
| 14 | Pengemudi | 3 |
| 15 | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 8 |
| 16 | Pengelola Administrasi Pemerintahan | 6 |
| 17 | Pengelola Data | 6 |
| 18 | Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi | 5 |
| 19 | Pengadministrasi Pemerintahan | 5 |
| 20 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 21 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 8 |
| 22 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 |
| 23 | Pengelola Data | 6 |
| 24 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 25 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 8 |
| 26 | Pengelola Keamanan dan Ketertiban | 6 |
| 27 | Pengelola Kesejahteraan Sosial | 6 |
| 28 | Satpol PP | 5 |
| 29 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| | | |

| No | JABATAN | Kelas Jabatan |
|------|--|-------------------------------------|
| XXIX | KELURAHAN | |
| 1 | Lurah | 9 |
| 2 | Sekretaris Kelurahan | 8 |
| 3 | Bendahara | 6 |
| 4 | Pengelola Keuangan | 6 |
| 5 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 6 |
| 6 | Verifikator Keuangan | 6 |
| 7 | Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi | 5 |
| 8 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 9 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 8 |
| 10 | Pengelola Administrasi Pemerintahan | 6 |
| 11 | Pengelola Keamanan dan Ketertiban | 6 |
| 12 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| 13 | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 8 |
| 14 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat | 6 |
| 15 | Pengadministrasi Umum | 5 |
| | | |
| 1 | Jabatan Fungsional | Sesuai ketentuan perundang-undangan |
| | | |



BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/ Wakil Bupati.

BAB II
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.352.973.340,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

Anggaran Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp170.973.340,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- c. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|---------------------|
| a. gaji pokok | Rp | 55.674.415,00 |
| b. tunjangan keluarga | Rp | 4.177.740,00 |
| c. tunjangan jabatan | Rp | 99.754.200,00 |
| d. tunjangan beras | Rp | 4.410.378,00 |
| e. tunjangan PPh | Rp | 1.491.197,00 |
| f. pembulatan gaji | Rp | 1.949,00 |
| g. iuran jaminan kesehatan | Rp | <u>5.463.461,00</u> |
| Jumlah | Rp | 170.973.340,00 |

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Pasal 5

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan

- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan perincian sebagai berikut:

- a. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan; dan
- b. penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Bupati sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 9





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo, perlu diberikan dana insentif desa dan kelurahan;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian DID dan K bagi Desa/Kelurahan dibagi dalam 8 (delapan) kategori yang didasarkan atas besaran ketetapan PBB-P2 yaitu:
 - a. ketetapan dibawah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- b. ketetapan lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - d. ketetapan lebih dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - e. ketetapan lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - f. ketetapan lebih dari Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - g. ketetapan lebih dari Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. ketetapan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan alokasi DID dan K untuk 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2.
- (3) 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan besaran alokasi DID dan K sebagai berikut:
- a. Desa/Kelurahan tercepat pertama mendapatkan DID dan K sebesar 18% (delapan belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan tercepat kedua mendapatkan DID dan K sebesar 16% (enam belas persen) dari ketetapan PBB-P2; dan
 - c. Desa/Kelurahan tercepat ketiga mendapatkan DID dan K sebesar 14% (empat belas persen) dari ketetapan PBB-P2.
- (4) DID dan K yang diberikan kepada Desa tercepat dalam pelunasan PBB-P2 merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) DID dan K yang diberikan kepada Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 10





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pendaftaran yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan untuk Taman Kanak-Kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. wilayah administrasi desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan
 - b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman <https://ppdb.temanggungkab.go.id> dan media pengumuman sekolah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi (jenjang SMP).
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi
3. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
4. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.
2. Jalur Pendaftaran
 - a. Jalur Afirmasi
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
 - c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Prestasi
- d. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati pada tahun 2023, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi penanggung jawab kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB II SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- i. BAB IX : PENUTUP.

Pasal 5

Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 12





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah.
6. Dewan Pembina dan Pengawas adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, nasehat dan saran kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Instansi Vertikal di Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Zakat, Infak, dan Sedekah yang selanjutnya disingkat ZIS.
14. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

15. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
16. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
18. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.
19. Munfik adalah orang atau badan yang memberi Infak.
20. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. *Fidyah* adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk membantu pengumpulan Zakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
27. Agama adalah Agama Islam.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan ZIS berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;

- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum Agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama;
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran Agama dibidang ZIS; dan
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang dikelola secara modern dan profesional.

Pasal 4

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Pengelolaan DSKL bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial keagamaan antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *Kafarat*, *Fidyah*, dan Hibah.

BAB II

DEWAN PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina dan Pengawas yang terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - h. Majelis Ulama Indonesia;

- i. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- j. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- k. Akademi; dan
- l. Tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dewan Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dan DSKL;
 - b. memberikan masukan saran dan pendapat kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL sudah sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL;
 - d. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS dan DSKL; dan
 - e. mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional ZIS dan DSKL.
- (2) Hak keuangan dan operasional Dewan Pembina dan Pengawas BAZNAS Kabupaten Temanggung bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAZ

Pasal 8

- (1) LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah harus melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang diprioritaskan untuk masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan DSKL kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPZ

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten Temanggung membentuk UPZ pada institusi sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. kantor Instansi Vertikal di Daerah;
- d. satuan pendidikan dasar atau nama lainnya;
- e. pemerintah desa;
- f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
- g. perusahaan swasta di Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN ZIS

Bagian Kesatu

Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 10

- (1) Selain mengumpulkan Zakat, BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat mengumpulkan Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *offline* dan *online*.
- (3) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Kotak Infak BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Kotak Infak Desa.
- (4) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital.
- (5) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat melibatkan UPZ.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Bagian Kedua

Pengumpulan ZIS

Pasal 11

- (1) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD dan pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta yang beragama Islam dengan gaji bruto, gaji 13, gaji 14, tunjangan kinerja, tunjangan profesi dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab, dianjurkan membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (4) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang tidak beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab dapat membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (5) UPZ Masjid/Mushola mengumpulkan ZIS dan DSKL dari masyarakat setempat.
- (6) Lembaga/Badan usaha lain milik orang Islam dan masyarakat beragama Islam yang memiliki pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab diwajibkan membayar zakat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 12

- (1) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan melakukan pendataan calon Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan menyampaikan data Muzakki, Munfik dan Mutashaddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan ketidaksediaan membayar ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan ketidaksediaan pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Data Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan Swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji non tunai, ZIS dibayarkan langsung melalui Bank pembayar gaji untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung.

- (2) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji tunai, ZIS dibayarkan langsung ke bendahara UPZ.
- (3) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan menyetorkan seluruh penerimaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Bukti setoran ZIS yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (satu) asli diberikan kepada Muzakki, Munfik dan Mutashaddik yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai arsip; dan
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.
- (5) UPZ Masjid/Mushola melaporkan hasil pengumpulan ZIS dan DSKL secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (6) Masyarakat dapat menyetorkan ZIS kepada UPZ terdekat atau ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZIS

Pasal 14

Pengembangan pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan di bidang pengumpulan dan pendistribusian ZIS;
- b. meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang memadai atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- c. digitalisasi pelayanan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- d. memaksimalkan sarana prasarana dan potensi; dan
- e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung dibebankan pada APBD, Hak Amil dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan LAZ.
- (3) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan UPZ dapat dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Apabila dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dibebankan pada Hak Amil.
- (6) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
- (7) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bersumber dari dana APBD.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan pada akhir tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan ZIS dan DSKL yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi berupa:

- a. pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai Amil Zakat; dan
- b. dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 13





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana; dan
 - m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Gaji Ketiga Belas.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 14





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- (2) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dihitung dengan faktor pengali yaitu indeks Prasarana Bangunan Gedung.

- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 17



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI DAN HARGA SATUAN
 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
 2023

I. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Bangunan Gedung Negara

| No | JENIS BANGUNAN GEUDNG KANTOR | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan Gedung negara Tidak Sederhana | m ² | 7.570.000,00 |
| 2. | Bangunan Gedung negara Sederhana | m ² | 6.460.000,00 |

B. Bangunan Rumah Negara

| No | JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rumah Tipe A | m ² | 7.290.000 |
| 2. | Rumah Tipe B | m ² | 6.870.000 |
| 3. | Rumah Tipe C, D, E | m ² | 6.180.000 |

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

| No | JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 3.880.000 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 2.675.000 |
| 3. | Pagar Samping | m ² | 2.775.000 |

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

| No | JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 3.660.000 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 1.730.000 |
| 3. | Pagar Samping | m ² | 1.830.000 |

II. HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bagunan Gedung

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|-----------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman | Pagar | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Tanggul/ <i>retaining wall</i> | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Turap batas kaveling/ persil | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokaso | Gapura | m ² | Rp. 10.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Gerbang | m ² | Rp. 10.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|---------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 3 | Konstruksi perkerasan | Jalan | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Lapangan Upacara | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Lapangan Olahraga Terbuka | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 4 | Konstruksi perkerasan aspal, beton | | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50 |
| 5 | Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i> | | m ² | Rp. 5.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 6 | Konstruksi Penghubung | Jembatan | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | <i>Box culvert</i> | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 7 | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% 0,325 | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|--|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 8 | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 9 | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 10 | Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah | Kolam renang | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 11 | Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 12 | Konstruksi menara | Menara <i>reservoir</i> | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Cerebong | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 13 | Konstruksi menara air | | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 14 | Konstruksi monumen | Tugu | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Patung | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Di dalam persil | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Di luar persil | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 15 | Konstruksi instalasi / gardu listrik | Instalasi listrik | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Instalasi telepon / komunikasi | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Instalasi pengolahan | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 16 | Konstruksi reklame / papan nama | Billboard papan iklan | Unit dan penambahannya | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa | Unit dan penambahannya | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | tembok pagar) | | | | | |
| 17 | Fondasi Mesin (diluar bangunan) | | unit mesin | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 18 | Konstruksi Menara televisi | | Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya) | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 19 | Konstruksi antena radio | | | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki : | Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 1.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 51-75 m | Unit | Rp. 1.100.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 76-100 m | Unit | Rp. 1.200.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|-------------------------|--------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Ketinggian 101-125 m | Unit | Rp. 1.300.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 126-150 m | Unit | Rp. 1.400.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian diatas 150 m | Unit | Rp. 1.500.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | 2) Sistem guy wire/ bentang kawat : | Ketinggian 0-50 m | Unit | Rp. 1.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 51-75 m | Unit | Rp. 1.100.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 76-100 m | Unit | Rp. 1.200.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian diatas 100 m | Unit | Rp. 1.300.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 20 | Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) | | | | | | |
| | | | | Menara bersama | | | |
| | | a) Ketinggian | Unit | Rp. | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | kurang dari 25 m | | 10.000.000,00 | | | |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 16.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Unit | Rp. 20.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Menara mandiri | | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Unit | Rp. 1.500.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 1.800.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Unit | Rp. 2.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar | | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 22 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | | | | | | |
| | | 1) Saluran | m ¹ | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---------------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | 2) Kolam tampung | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 23 | Konstruksi Penyimpanan/ silo | | m ³ | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

Keterangan:

1. RB= Rusak berat
2. RS= Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.920.329.183.722,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.616.598.571.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.240.191.603.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp127.861.128.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp13.205.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.063.276.383.157,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.459.427.281.030,00 (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.458.784.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp96.420.303.551,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp140.843.800.740,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.504.648.007,00 (tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp21.518.149.121,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp46.746.917.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp159.513.246.114,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp95.418.242.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.980.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp203.643.575.194,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp699.247.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.458.118.522,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp567.883.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.713.118.693,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.551.741.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp22.231.869.897,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.093.120.316,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp12.845.219.942,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp78.752.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp13.170.440.876,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.865.890.248,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.714.112.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp22.029.999,00 (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.293.680.126,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.911.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 18





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1392);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023–2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Gizi Spesifik yang selanjutnya disebut Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
11. Intervensi Gizi Sensitif yang selanjutnya disebut Intervensi Sensitif adalah kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
12. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan Desa.
13. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
14. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

18. Keluarga Berisiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan melaksanakan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan angka prevalensi Stunting melalui:

- a. peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- b. pemenuhan asupan gizi;
- c. perbaikan pola asuh;
- d. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan dan pemangku kepentingan menyusun rencana kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (3) Perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai target pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024 dilaksanakan sesuai 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang mencakup:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin pasangan usia subur;
 - d. pengamatan Keluarga Berisiko Stunting;
 - e. audit kasus Stunting; dan
 - f. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada Keluarga Berisiko Stunting.

BAB IV KOORDINASI Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan TPPS tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah;

- c. lembaga/organisasi kemasyarakatan dan profesi;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Program TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan TPPS tingkat Kecamatan.
- (2) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan Stunting;

- d. monitoring dan Evaluasi Stunting di tingkat Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan TPPS tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. memfasilitasi tim pendamping Keluarga Berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh TPPS secara berjenjang.
- (2) Pemantauan oleh TPPS tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Oktober.
- (3) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat Bulan Oktober.
- (4) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kabupaten dilaksanakan pada minggu kedua Bulan November.
- (5) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh TPPS secara berjenjang.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan Stunting di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 22



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023-2024

PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Membentuk TPPS Tingkat Kabupaten | Terbentuknya TPPS Tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | BAPPEDA | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Membentuk TPPS Tingkat Kecamatan | Terbentuknya TPPS Tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Membentuk TPPS Tingkat Desa/Kelurahan | Terbentuknya TPPS Tingkat Desa/Kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Melaksanakan rapat koordinasi | | | | | | | | |
| a | Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kabupaten | Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | BAPPEDA | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Rapat koordinasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan | Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan | Pemerintah Desa dan Kelurahan | DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Melaksanakan Rembug <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kabupaten | Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | PUSKESMAS | 2 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan | Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan | Pemerintah Desa | PKB, PUSKESMAS, DPPPAPPKB, DINKES, DINPERMADES | 2 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|--|---|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Mengalokasikan anggaran penurunan Stunting | | | | | | | | |
| a | Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran | Jumlah Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran | Semua OPD terkait | BAPPEDA, BPKPAD, Bagian Pembangunan Setda | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran | Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran | Pemerintah Desa | BAPPEDA, DINPERMADES | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Pemangku Kepentingan mengalokasikan anggaran | Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengalokasikan anggaran | Pemangku Kepentingan terkait | BAPPEDA, BPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Memastikan ketersediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan | | | | | | | | |
| a | Semua desa/kelurahan terdapat bidan desa yang bertempat tinggal di wilayah tersebut | Tersedianya bidan desa di semua kelurahan/desa | DINKES | Pemerintah Desa | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan stunting | | | | | | | | |
| a | Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting | Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting | KEMENAG | Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Bagian Kesra | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan | Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan | KEMENAG | Kecamatan, Bagian Kesra | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa | Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa | KEMENAG | Pemerintah Desa, Bagian Kesra, Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting. | | | | | | | | |
| a | Adanya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait | Tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait | BAPPEDA | DINPERMADES, BPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Penyediaan anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting | Tersedianya anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting | BAPPEDA | Kecamatan, BPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Penyediaan anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting | Tersedianya anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting | DINPERMADES | BAPPEDA, Pendamping Desa, Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|--|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting. | | | | | | | | |
| a | Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah | Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah | DPPPAPPKB | DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan | Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan | DPPPAPPKB | DINKES, Kecamatan | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa | Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa | DPPPAPPKB | DINKES, DINPERMADES, Bagian Pemerintahan | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Menyelenggarakan pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | | | | | | | | |
| a | Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | DINSOS | BAPPEDA, DINKES | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan | Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan | DINSOS | Kecamatan, DINKES | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Menyelenggarakan pembinaan kader pembangunan manusia | | | | | | | | |
| a | Pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten | Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten | DINPERMADES | DINKES, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan | Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan | DINPERMADES | DINKES, Kecamatan, DPPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat desa | Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat desa | DINPERMADES | DINKES, DPPPAPPKB | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| B | Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku Dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. | | | | | | | | |
| a | Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten | Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten | DINKES | DPPPAPPKB, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan | Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan | DINKES | Kecamatan, DPPPAPPKB, DINKOMINFO | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|--|----------|-----------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa | Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPAPPKB, DINKOMINFO | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan Stunting. | | | | | | | | |
| a | Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten | Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten | DINKOMINFO | Semua OPD, Pemangku Kepentingan | 9 | kanal/ perbulan | 9 | 5 | 5 |
| b | Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | DINKOMINFO | Kecamatan | 9 | kanal/ perbulan | 9 | 5 | 5 |
| c | Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa | Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa | DINKOMINFO | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES | 9 | kanal/ perbulan | 9 | 5 | 5 |
| 3 | Peningkatan cakupan keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) | | | | | | | | |
| a | Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten | Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten | DINKES | DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan | Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan | DINKES | Kecamatan, DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa | Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPUPR, DINKOMINFO, DPRKPLH | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | | | | | | | |
| a | Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten | Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten | DINKES | DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|---|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan | Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan | DINKES | Kecamatan, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa | Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Meningkatkan pemberian imunisasi dasar lengkap | | | | | | | | |
| a | Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten | Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten | DINKES | DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan | Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan | DINKES | DINKOMINFO, Kecamatan | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa | Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |
| a | Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten | Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten | DINKES | BAPPEDA,BKPSDM, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan | Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan | DINKES | Kecamatan, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa | Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penangan | | | | | | | | |
| a | Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penangan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penangan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | DINDIKPORA | DINKES, DPPPAPKKB | 1.57 | persen | 1.5 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|--|---|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan | Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan | DINDIKPORA | Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB | 1.57 | persen | 1.5 | 100 | 100 |
| c | Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa | Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa | DINDIKPORA | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB | 1.57 | persen | 1.5 | 100 | 100 |
| 8 | Meningkatkan cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD- | | | | | | | | |
| a | Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten | Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten | DINDIKPORA | DINKES, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan | Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan | DINDIKPORA | Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa | Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa | DINDIKPORA | Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar | | | | | | | | |
| a | Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten | Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten | DINKES | DPPPAPPKB, Tim Pakar | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan | Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan | DINKES | Kecamatan, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa | Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|---|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i> | Tersedianya pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i> | DPPPAPPKB | DINKES | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Penyuluh untuk mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB) | Terselenggaranya tim penyuluh yang mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB) | DPPPAPPKB | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB) | Terselenggaranya pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB) | DPPPAPPKB | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat | | | | | | | | |
| a | Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten | Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten | DINSOS | DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan | DINSOS | Kecamatan, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan | Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan | DINSOS | Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Meningkatkan cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi KIE bagi remaja | Terselenggaranya sosialisasi KIE bagi remaja | DPPPAPPKB | DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) | Terselenggaranya sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) | DPPPAPPKB | Kecamatan, KEMENAG, DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan pengolahan BKR dan PIK Remaja | Tersedianya pelatihan pengelola BKR dan PIK Remaja | DPPPAPPKB | Bagian Pemerintahan, DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|---|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten | Kantor KEMENAG | DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan | Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan | Kantor KEMENAG | Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa | Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten desa | Kantor KEMENAG | Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama. | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten | Kantor KEMENAG | FKUB, DINKES, DPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan | Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan | Kantor KEMENAG | Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa | Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa | Kantor KEMENAG | Bagian Pemerintah, DINKES, DPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|--|---|--|--------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 | Meningkatkan cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Kantor KEMENAG | DINKES, DPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Kantor KEMENAG | DINKES, DPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Desa | Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Kantor KEMENAG | DINKES, DPPAPPKB, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| C | Pilar 3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa | | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah | | | | | | | | |
| a | Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten | Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten | BAPPEDA | Semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan | Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan | BAPPEDA | Semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|-----------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa | Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa | BAPPEDA | Semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | BAPPEDA, BPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan | Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | Kecamatan, BAPPEDA, BPPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Adanya perencanaan penganggaran dan tindak lanjut untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan | Tersedianya perencanaan penganggaran untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | BAPPEDA, BPKPAD | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | DINPERMADES | BAPPEDA | 90 | persen | 90 | 90 | 90 |
| b | Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | DINPERMADES | Kecamatan, BAPPEDA | 90 | persen | 90 | 90 | 90 |
| c | Desa/kelurahan mengalokasikan dana untuk intervensi spesifik dan sensitif | Tersedianya alokasi dana Desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif | DINPERMADES | Bagian Pemerintahan, BAPPEDA | 90 | persen | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |
| a | Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | BAPPEDA | Semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | BAPPEDA | Kecamatan, semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . | Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa | BAPPEDA | Bagian Pemerintahan, semua OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | | | | | | | | |
| a | Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten | Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten | DINKES | DPUPR, DPRKPLH | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| b | Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan | Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|----------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan | Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan | DINKES | DINPERMADES | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Meningkatkan cakupan calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD). | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten | DINKES | DINKOMINFO, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin | Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin | DINKES | Kecamatan, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan | Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan | DINKES | Bagian Pemerintahan, DINPERMADES | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Meningkatkan cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi. | | | | | | | | |
| a | Peningkatan jumlah Ibu hamil KEK yang menerima PMT untuk tambahan asupan gizi | Terselenggaranya PMT untuk tambahan asupan gizi Ibu hamil KEK | DINKES | DPPPAPPKB, DKPPP | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan | Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Meningkatkan cakupan ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan. | | | | | | | | |
| a | Advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan | Terselenggaranya advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | DINKES | DPPPAPPKB, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|--|---|--|--|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Meningkatkan cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. | | | | | | | | |
| a | Advokasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan | Terseleenggaranya advokasi untuk Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan | DINKES | DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan | Terlaksananya sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan | Terjadinya peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan | DINKES | Pemerintah Desa, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Meningkatkan cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). | | | | | | | | |
| a | Advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan | Terseleenggaranya advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan | DINKES | DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan | Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | | | | | | | | |
| a | Advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk | Terseleenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk | DINKES | DPPPAPPKB, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten | Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten | DINKES | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|---|--|--|----------|-----------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. | | | | | | | | |
| a | Advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi | Terselenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi | DINKES | DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten | Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten | DINKES | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan | Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting. | | | | | | | | |
| a | Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | DKPPPP | DKPPP, DINKOPDAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan | Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan | DKPPPP | Kecamatan, DKPPP, DINKOPDAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa | Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa | DKPPPP | Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP, DINKOPDAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting. | | | | | | | | |
| a | Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit) | Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit) | DINKES | Semua RS, DPUPR, DPPPAPPKB | 4 | RS | 4 | 4 | 4 |
| b | Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | DINKES | DPUPR, DPPPAPPKB | 17 | PUSKESMAS | 17 | 17 | 17 |
| 15 | Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat Desa/Kelurahan (posyandu) | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|--|--|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten | Tersedianya pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | DINKES, DINPERMADES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan | Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan, DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan | Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, DINKES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting. | | | | | | | | |
| a | Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten | Terselenggaranya pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten | DPPPAPPKB | DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| b | Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan | Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| c | Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa | Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. | | | | | | | | |
| a | Advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten | Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten | DINKES | DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | DINKES | Kecamatan, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan | Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Meningkatkan cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin). | | | | | | | | |
| a | Pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri | Adanya pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri | DINKES | DINSOS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan | Terlaksananya advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan | DINKES | DINDIKPORA | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|--|--|---------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Melaksanakan sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia | Terselenggaranya sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia | DINKES | DINDIKPORA | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Menyediakan data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |
| a | Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten | DPPPAPPKB | DINKES, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | DPPPAPPKB | DINKES, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan | Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Meningkatkan cakupan kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate /ASFR (15-19)</i> paling sedikit 18 per 1.000. | | | | | | | | |
| a | Peningkatan pendewasaan usia perkawinan | Adanya peningkatan pendewasaan usia perkawinan | DPPPAPPKB | DINKES, Kantor KEMENAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Meningkatkan cakupan KB pasca persalinan | Adanya peningkatan cakupan KB pasca persalinan | DPPPAPPKB | DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Melaksanakan sosialisasi tentang Jo Kawin Bocah | Terlaksananya sosialisasi tentang Kawin Bocah | DPPPAPPKB | DINKES, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan. | | | | | | | | |
| a | Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten | Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten | DPPPAPPKB | DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS) | DPPPAPPKB | Kecamatan, DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat desa | Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat desa | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Menurunkan cakupan pelayanan berencana <i>unmet need</i> keluarga | | | | | | | | |
| a | Memfasilitasi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> | Tersedianya fasilitas alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> | DPPPAPPKB | DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan | Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | DINKES, RS | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|--|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| D | Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana. | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten | DINKES | BPBD | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan | Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan, BPBD | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan | Adanya intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan | DKPPP | Pemerintah Desa, TP PKKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatkan asupan gizi keluarga berisiko Stunting melalui pemanfaatan sumber daya pekarangan | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten | Terselenggaranya sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten | DKPPP | DINPERMADES, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan | Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan | DKPPP | DINPERMADES, DINKOMINFO | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | DKPPP | Pemerintah Desa, DINPERMADES, DINKOMINFO | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting | | | | | | | | |
| a | Advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting | Terlaksananya advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> | DKPPP | DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan | Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan | DKPPP | Kecamatan, DINKOMINFO | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Adanya bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | DKPPP | DINKES, Pemerintah Desa, DPPAPPKB, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Memberikan variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|---|--|-------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kabupaten | Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan | DINSOS | DINPERMADES, DKPPP | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan | Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan | DINSOS | Kecamatan, DINPERMADES, DKPPP | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan | Adanya intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan | DINSOS | Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Memberikan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | | | | | | | | |
| a | Pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | DINSOS | DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan | Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan | DINSOS | DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan | DINSOS | Pemerintah Desa, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Memberikan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | | | | | | | | |
| a | Pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | DINSOS | DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|--|--|--|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan | Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan | DINSOS | Kecamatan, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pemberian bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan | DINSOS | Pemerintah Desa, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Meningkatkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | | | | | | | | |
| a | Pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | Adanya pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | DINSOS | DINKES, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan | Terlaksananya advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan | DINSOS | Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan | Terselenggaranya updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan | DINSOS | Pemerintah Desa, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Meningkatkan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | | | | | | | | |
| a | Pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | Adanya pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | DINKES | DINKOPDAG, DPM | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | | |
|----------|---|---|--|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| b | Pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan | Adanya pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan, DINKOPDAG, DPM | 1 | kali | 1 | 1 | 1 | |
| c | Sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, DINKOPDAG | 1 | kali | 1 | 1 | 1 | |
| E | Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi | | | | | | | | | |
| 1 | Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting | | | | | | | | | |
| a | melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten | Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten | DINKOMINFO | BAPPEDA | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| b | melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | DINKOMINFO | Kecamatan, BAPPEDA | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| c | melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa | Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa | DINKOMINFO | Pemerintah Desa, BAPPEDA | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Meningkatkan kinerja pemerintah dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting | | | | | | | | | |
| a | Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | BAPPEDA | OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| b | Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | BAPPEDA | Kecamatan, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| c | Meningkatkan kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | Meningkatnya kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | BAPPEDA | OPD terkait, Pemerintah Desa | 100 | persen | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Melakukan publikasi data Stunting | | | | | | | | | |
| a | Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | DINKES | BAPPEDA, DPPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|--|--|--|------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | DINKES | Kecamatan, BAPPEDA, DPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | Pemerintah Desa, BAPPEDA, DPPAPPKB | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah | BAPPEDA | OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan | BAPPEDA | Kecamatan | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa | Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa | BAPPEDA | Pemerintah Desa, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Menyelenggarakan audit kasus <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Pelaporan audit kasus <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | Kabupaten, OPD terkait, Tim Pakar | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| b | Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan | Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan, OPD terkait, Tim Pakar | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| c | Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Desa/Kelurahan | Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Desa/Kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, OPD terkait | 2 | kali | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu. | | | | | | | | |
| a | Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten | DINKOMINFO | OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan | DINKOMINFO | Kecamatan, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat desa | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat desa | DINKOMINFO | Pemerintah Desa, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----------|---|---|--|----------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Menyediakan sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi | | | | | | | | |
| a | Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten | Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | BAPPEDA, BPKPAD | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan | Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | Kecamatan, BAPPEDA, BPKPAD | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/kelurahan | Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/Kelurahan | DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda | Pemerintah Desa, BAPPEDA, BPKPAD | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting | | | | | | | | |
| a | Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten | DINKOMINFO | OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan | DINKOMINFO | Kecamatan, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa | Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa | DINKOMINFO | Pemerintah Desa, OPD terkait | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Menyediakan data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). | | | | | | | | |
| a | Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten | Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten | DPPPAPPKB | BPS, DINSOS, DINDUKCAPIL | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|---|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan | Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan | DPPPAPPKB | Kecamatan, DINSOS, DINDUKCAPIL | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan | Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan | DPPPAPPKB | Pemerintah Desa, DINSOS, DINDUKCAPIL | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Menyediakan sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah. | | | | | | | | |
| a | Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten | Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten | DINKOMINFO | Kantor KEMENAG, DINKES, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan | Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan | DINKOMINFO | Kantor KEMENAG, Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| c | Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/Kelurahan | Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/kelurahan | DINKOMINFO | Kantor KEMENAG, Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> | | | | | | | | |
| a | Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | DINKES | DPPPAPPKB, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| b | Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | DINKES | DPPPAPPKB, Kecamatan, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|--|--|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| c | Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | DINKES | DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, TP PKK | 100 | persen | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi | | | | | | | | |
| a | Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten | Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten | BAPPEDA | Kabupaten, OPD terkait | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan | Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan | BAPPEDA | OPD terkait | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan | Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan | BAPPEDA | DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, OPD terkait | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi. | | | | | | | | |
| a | Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten | Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten | Perguruan Tinggi | DINKES, DPPPAPPKB | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| b | Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan | Terselenggaranyapendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan | Perguruan Tinggi | DINKES, DPPPAPPKB | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| c | Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa | Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa | Perguruan Tinggi | Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB | 3 | kali | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Menyusun rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|-----------|---|---|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | BAPPEDA | DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | BAPPEDA | DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | BAPPEDA | DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Menyediakan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | | | | | | | | |
| a | Pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | Adanya pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | BPKPAD | OPD terkait | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| b | Advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | Terlaksananya advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | BPKPAD | Kecamatan, OPD terkait | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| c | Pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | Terlaksananya pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi | BPKPAD | Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Menyusun kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. | | | | | | | | |
| a | Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten | BPKPAD | BAPPEDA | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab | Pendukung | Baseline | Satuan | Target | | |
|----|---|--|--|---|----------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| b | Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan | BPKPAD | BAPPEDA, Kecamatan | 1 | kali | 1 | 1 | |
| c | Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan | BPKPAD | Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES | 1 | kali | 1 | 1 | 1 |

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

FORMAT PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | BASELINE | TARGET KINERJA 2023 | CAPAIAN KINERJA 2023 | ANGGARAN (RP) | DPA | REALISASI S/D SEMESTER 1 2023 | | REALISASI S/D SEMESTER 2 2023 | | SUMBER DANA |
|----|---------|----------|--------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|-----|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd.
 M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

FORMAT EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | OPD | PERMASALAHAN | SOLUSI | SIMPULAN |
|----|---------|----------|-----------------|----------------------|-----|--------------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

5. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
12. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Belanja *Online* adalah metode Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *marketplace* yang mencerminkan persaingan usaha.
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

20. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan batas nilai tertentu.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan bagian dari rencana umum pengadaan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di BUMD agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lain dapat tercapai.
22. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
23. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Daerah yang menggunakan anggaran bersumber dari:
 - a. dana perusahaan/BUMD;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang /Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau Pelaku Usaha Daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. memperhatikan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. seluruh pengurus, pegawai dan keluarganya dilarang untuk menjadi Penyedia di BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai pelaku pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
 - e. pelaku pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia Pengadaan;
 - e. Penyelenggara Swakelola; dan
 - f. Penyedia.
- (3) BUMD dapat menunjuk personel di luar BUMD untuk menjadi Panitia Pengadaan dan/atau Pejabat Pengadaan dalam hal belum memiliki personel yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Pembentukan pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP.
- (7) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada masing-masing BUMD.
- (8) Pengadaan yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, harus disetujui oleh Dewan Pengawas pada BUMD.

BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. Penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 11

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paragraf 2

Penetapan HPS

Pasal 12

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*)
- (3) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (4) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pembelian Langsung dan Belanja *Online*.
- (7) Batas maksimal nilai Pembelian Langsung ditetapkan dalam Peraturan Direksi berdasarkan kajian meliputi sekurang-kurangnya spesifikasi barang, kontinuitas kebutuhan Barang, dan urgensi kebutuhan.

- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 3

Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; dan
 - d. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan; dan
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.

Paragraf 4

Bentuk Kontrak

Pasal 14

Bentuk Kontrak terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja;
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

Paragraf 5

Uang Muka

Pasal 15

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Ketentuan mengenai besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Paragraf 6
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.

Paragraf 7
Sertifikat Garansi

Pasal 17

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8
Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 18

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Belanja *Online*;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.

- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (4) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (5) Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (6) Metode 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 9

Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 19

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file; atau
 - b. 2 (dua) file.
- (4) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode 1 (satu) file.
- (5) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode 2 (dua) file.

Paragraf 10
Kualifikasi

Pasal 20

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

Paragraf 11
Dokumen Pemilihan

Pasal 21

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Swakelola meliputi:
 - a. Persiapan Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Swakelola;
 - c. Pelaporan Swakelola; dan
 - d. Pengawasan Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (3) Pelaksanaan Belanja *Online* dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha sekitar tidak dapat memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan BUMD.
 - (4) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (5) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
 - (6) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (7) Dalam hal Kontrak harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan selesai, RUP diumumkan, dan sebelum penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - (8) Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan.

Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal

Pasal 24

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 25

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. penandatanganan Kontrak;
- c. pemberian uang muka;
- d. pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. perubahan Kontrak;
- f. penyesuaian harga;
- g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
- h. pemutusan Kontrak;
- i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. penanganan keadaan kahar.

BAB VIII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 26

- (1) BUMD mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara bertahap .

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN JAMAK

Pasal 27

- (1) Pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau tahun jamak, maka BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMD, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau tahun jamak, Direksi wajib membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practice* yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

Pengawas internal BUMD wajib melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Seluruh BUMD wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 23





BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta evaluasi kelembagaan, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 24





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

RKPD Tahun 2024 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Buku 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II/Buku 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 30

